

UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP AKSESABILITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA PERIODE SEBELUM DAN SETELAH
DESENTRALISASI FISKAL)**

SKRIPSI

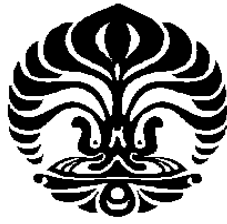
DAYU LARASATI

1006811381

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI**

SALEMBA

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP AKSESABILITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA PERIODE SEBELUM DAN SETELAH
DESENTRALISASI FISKAL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

DAYU LARASATI

1006811381

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
SALEMBA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Dayu Larasati

NPM : 1006811381

Tanda Tangan :

Tanggal : 16 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dayu Larasati

NPM : 1006811381

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi

Bahasa Indonesia : Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal)

Bahasa Inggris : Analysis of The Impact of Fiscal Decentralization on Education Accessibility in Indonesia (a Case Study of Regency/Municipality in Indonesia Pre- and Post-Fiscal Decentralization)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada **Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ayuningtyas Hertianti, SE., MM.

Penguji : Deddi Nordiawan S.E., M.M.

Penguji : Eko Wisnu Warsitosunu S.E., M.M.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi

Sri Nurhayati, SE, MM

NIP. 19600317 198602 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberi kesehatan, kesempatan dan nikmat yang tiada hingga, serta shalawat dan salam atas keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW. Segala usaha dalam penulisan skripsi ini tidak dapat saya lepaskan dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu dalam berbagai cara dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang paling dalam dan tulus kepada:

- (1) Bapak Prof. Dr. der. Soz. Gumilar Rusliwa Somantri selaku Rektor Universitas Indonesia.
- (2) Bapak Prof. Firmanzah, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
- (3) Ibu Ayuningtyas Hertianti, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah begitu sabar memberikan banyak bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.
- (4) Bapak Deddi Nordiawan, S.E., M.M. dan Bapak Eko Wisnu Warsitosunu, S.E., M.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun pada penyusunan skripsi ini.
- (5) Kedua orang tua dan mertua yang tiada henti mendoakan saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
- (6) Hendra Sahputra, suami terkasih, belahan jiwa, dan cahaya hati yang selalu memberikan doa dan dukungannya yang tulus dan terbaik.
- (7) Kakak-kakak yang selalu membimbing, Mas Dito, Mbak Diana, Cutkak dan Suami, Cutbang dan istri, Cutngoh dan istri serta keponakan yang lucu-lucu, yang selalu “ngangenin” dan membuat saya selalu tersenyum.
- (8) Teman-teman yang telah membantu dalam pengumpulan data, rekan-rekan di DJPK, Indri, serta teman seperjuangan penulisan skripsi ini, Windhy dan Tomy.

- (9) Teman-teman Kepatuhan Internal dan Ibu Kasubbag yang baik hati, Ibu Widya.
- (10) Unggul, mas Pilar, mbak Renny, mas HPI yang turut serta memberikan semangat dan saran-saran.
- (11) Rekan-rekan kerja di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), khususnya rekan Kepegawaian.
- (12) Teman-teman ekstensi FE UI angkatan 2010 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.
- (13) Teman-teman HIMASURYA khususnya Dondy dan Mia yang selalu ada saat dukungannya dibutuhkan.
- (14) Pihak-pihak yang tidak disebut disini namun telah memberikan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung.

Akhir kata, saya berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang mendalam bagi kita semua.

Jakarta, 16 Juli 2012

Dayu Larasati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dayu Larasati
NPM : 1006811381
Program Studi : Ekstensi Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan Di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia Periode Sebelum Dan Setelah Desentralisasi Fiskal)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada Tanggal : 16 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Dayu Larasati)

ABSTRAK

Nama : Dayu Larasati
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan Di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia Periode Sebelum Dan Setelah Desentralisasi Fiskal)

Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin; 5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.

Kata kunci:
desentralisasi fiskal, alokasi anggaran pendidikan, aksesabilitas pendidikan.

ABSTRACT

Nama : Dayu Larasati
Study Program : Accounting
Title : Analysis of The Impact of Decentralization on Education
Accessibility in Indonesia (Case Study of Municipality/Regency
in Indonesia Pre- and Post-Fiscal Decentralization)

Fiscal decentralization carried out with the belief that local governments understand the needs of people in the region better than the Central Government does. With a policy of fiscal decentralization, local governments are expected to achieve a more equitable social welfare. This research was conducted because of the increasing demands of society that the government should pay attention to their needs, especially education that is now a major requirement for the community and even falls into one of national priorities. The conclusions of this study are: 1. Increased own source revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and special purpose grant (DAK) of education can increase educational spending by district/municipality local government; 2. Increased spending on education by district/municipality local government can improve the accessibility of education by the public; 3. The welfare of district/municipality can increase educational spending by district/municipality local government and accessibility of public education 4. In rich district/municipality, the increase in districts/cities local government education spending has a greater effect on increasing accessibility of public education than in poor district/municipality; 5. Fiscal decentralization policy can improve the accessibility of education by the community.

Key words:

Fiscal decentralization, education budget allocation, education accessibility.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Batasan Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
2. LANDASAN TEORI	
2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	10
2.1.1. Otonomi Daerah	10
2.1.2. Desentralisasi Fiskal	12
2.2. Struktur Keuangan Daerah.....	13
2.3. Pendapatan Daerah	14
2.3.1. Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.3.2. Dana Perimbangan.....	15
2.3.2.1 Dana Bagi Hasil.....	15
2.3.2.2 Dana Alokasi Umum	17
2.3.2.3 Dana Alokasi Khusus	17
2.2.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	18
2.4. Belanja Daerah	18
2.4.1 Klasifikasi Menurut Organisasi.....	18
2.4.2 Klasifikasi Menurut Fungsi.....	18

2.4.3	Klasifikasi Menurut Program dan Kegiatan	19
2.4.4	Klasifikasi Menurut Jenis Belanja	19
2.5.	Indeks Pembangunan Manusia (<i>Human Development Index</i>).....	19
2.6.	Aksesabilitas Pendidikan oleh Masyarakat dalam Dimensi Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia	20
2.7.	Indikator Kesejahteraan Masyarakat	21
2.8.	Peraturan Terkait Otonomi Daerah.....	22
2.8.1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah	22
2.8.2	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	25
2.9.	Penelitian Sebelumnya	28
2.10.	Hipotesis Penelitian	31
3.	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1.	Populasi dan Sampel	36
3.2.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4.	Model Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	37
3.5.	Teknik Analisis Data.....	41
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif	41
3.5.2.	Metode Regresi Data Panel.....	41
3.5.2.1.	Uji Chow	42
3.5.2.2.	Uji Hausman	43
3.5.2.3.	Uji Lagrange Multiplier	43
3.5.3.	Uji Hipotesis	44
3.5.3.1.	Uji-F	44
3.5.3.2.	Uji-t.....	45
3.5.3.3.	Uji <i>Goodness of Fit</i> (R^2)	45
4.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Statistik Deskriptif	46
4.2.	Model Pengeluaran Pendidikan	48
4.2.1.	Analisis Pemilihan Metode Regresi Data Panel	48
4.2.2.	Hasil Uji Model Pengeluaran Pendidikan	49
4.2.2.1	Hasil Uji-F	50
4.2.2.2	Hasil Uji-t	50

4.2.2.3 Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i> (R^2)	50
4.2.2.4 Hasil Uji Hipotesis Model Pengeluaran Pendidikan	51
4.3. Model Aksesabilitas Pendidikan.....	53
4.3.1 Analisis Pemilihan Metode Regresi Data Panel	53
4.3.2 Hasil Uji Model Aksesabilitas Pendidikan	54
4.3.2.1 Hasil Uji-F	54
4.3.2.2 Hasil Uji-t	54
4.3.2.3 Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i> (R^2)	55
4.3.2.4 Hasil Uji Hipotesis Model Aksesabilitas Pendidikan	55
4.4. Pembahasan Mengenai Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan Masyarakat.....	58
5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 . Kesimpulan	61
5.2. Saran Untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat	61
5.2.1. Saran Untuk Pemerintah Daerah	61
5.2.2. Saran Untuk Masyarakat.....	62
5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya.....	62
DAFTAR REFERENSI.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase Sumber Pendapatan Daerah.....	2
Tabel 1.2. Realisasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Tahun 1991-2007	4
Tabel 1.3. Tren Indeks Pembangunan Manusia Tahun 1980-2011	5
Tabel 2.1. Alokasi DBH Sumber Daya Alam	16
Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel	40
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Data Periode Sebelum Desentralisasi Fiskal.....	46
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Data Periode Desentralisasi Fiskal.....	46
Tabel 4.3. Beda Rata-Rata dengan Kategori WEALTH	48
Tabel 4.4. Ringkasan Output Regresi Model Pengeluaran Pendidikan.....	49
Tabel 4.5. Ringkasan Output Regresi Model Aksesabilitas Pendidikan	54
Tabel 4.6. Ringkasan Output Regresi Sederhana Variabel EDU dan BPEND	57

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1. Formula DAU.....	17
Rumus 3.1. Model Umum Regresi Data Panel.....	38
Rumus 3.2. Model Pengeluaran Pendidikan.....	39
Rumus 3.3. Model Aksesabilitas Pendidikan.....	39
Rumus 3.4. Ukuran Aksesabilitas Pendidikan.....	39
Rumus 3.5. Persamaan <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	41
Rumus 3.6. Persamaan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	41
Rumus 3.7. Persamaan <i>Random Effect Model</i> (REM).....	42
Rumus 3.8. Persamaan Uji Chow.....	42
Rumus 3.9. Persamaan Uji Hausman.....	43
Rumus 3.10. Persamaan Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kabupaten/Kota Subyek Penelitian
Lampiran 2 : Tabel Output Uji Beda SPSS
Lampiran 3 : Tabel Output Pemilihan Metode Regresi Model Pengeluaran Pendidikan
Lampiran 4 : Tabel Output Regresi Model Pengeluaran Pendidikan.....
Lampiran 5 : Tabel Output Pemilihan Metode Regresi Model Aksesabilitas Pendidikan
Lampiran 6 : Tabel Output Regresi Model Aksesabilitas Pendidikan
Lampiran 7 : Tabel Output Regresi Pengaruh BPEND Terhadap EDU.....

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

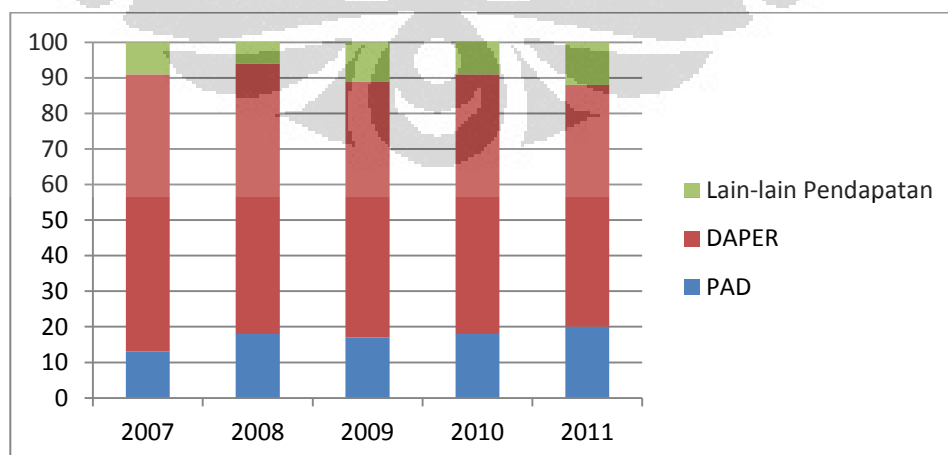
Otonomi daerah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya atas dasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1999 ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan pada tiap daerah otonom, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penyerahan wewenang tersebut, daerah otonom berhak untuk mengelola sumber daya yang terdapat di wilayahnya dan wajib melakukan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Kewenangan pemerintah tersebut diserahkan pada dasarnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, namun untuk urusan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota atau belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meliputi

11 bidang termasuk didalamnya adalah pendidikan dan kebudayaan. Bahl (1998) dan Rahmawati (2008) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal mensyaratkan adanya pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*) yang mengiringi pemberian tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (*expenditure assignment*) sehingga hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa. Dengan demikian, kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Mardiasmo, 2009).

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dalam pelaksanaannya, kondisi keuangan Pemerintah Daerah masih menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya persentase total dana perimbangan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Dapat dilihat pada tabel 1.1., total komponen pendapatan asli daerah rata-rata tidak lebih dari 20% total pendapatan. Padahal, dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal sebagai wujud dari otonomi daerah Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menggali potensi pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1. Persentase Sumber Pendapatan Daerah



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah APBD 2011 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, telah diolah kembali.

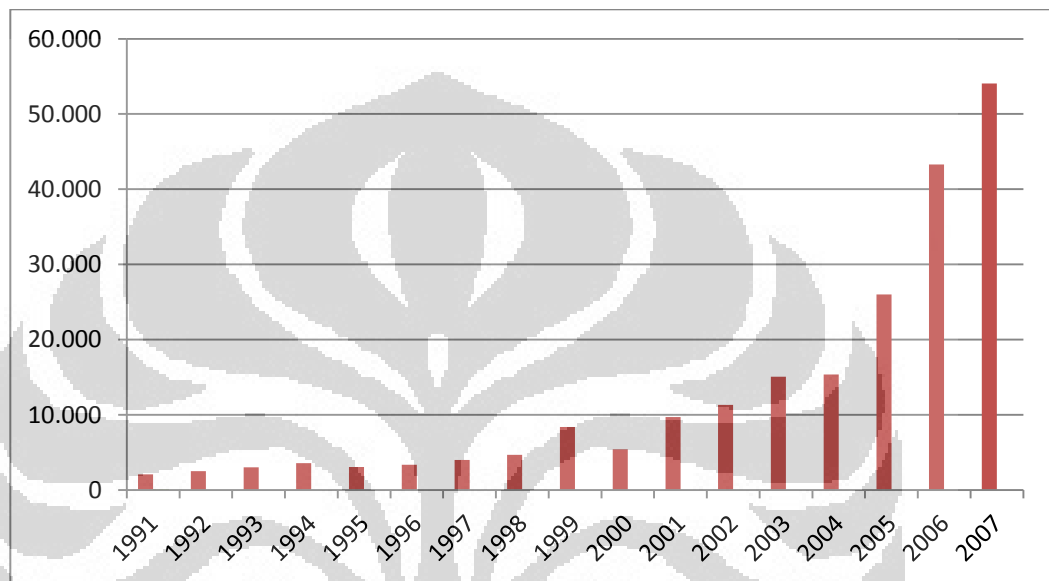
Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah tentunya lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Oates (1972) dalam Busemeyer (2007) menyatakan bahwa inti dari teori desentralisasi adalah bahwa dengan desentralisasi, Pemerintah Daerah akan menjadi lebih efisien dalam menyediakan barang publik secara lokal dan dalam jumlah yang berbeda-beda dibandingkan dengan menyediakan barang publik dengan tingkat yang seragam melalui Pemerintah Pusat. Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari otonomi daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Pendidikan dianggap sebagai hal terpenting dibandingkan bidang-bidang pemerintahan lain yang disebutkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Di abad 21 ini, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan selalu menjadi prioritas. Tanpa pendidikan yang memadai dan baik, suatu negara tidak akan memiliki tunas bangsa yang bermutu tinggi untuk menjadi penerus generasi. Seperti yang dikemukakan oleh Tim UNESCO (2001), suatu negara tidak dapat dinyatakan berhasil apabila belum mendidik rakyatnya.

Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa negara seharusnya mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Susanto dan Kurniawan, 2009). Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangannya pada hari selasa 16 Agustus 2011 menyampaikan bahwa pada tahun 2012, pemerintah tetap memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Realisasi anggaran sektor pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak tahun 1999 dan jumlah realisasi anggaran pada tahun 2007 meningkat sebesar dua puluh enam kali lipat dibandingkan

dengan jumlah pada tahun 1991. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah semakin menganggap bahwa pendidikan adalah kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas negara.

Tabel 1.2. Realisasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Tahun 1991 – 2007
(dalam Milyar Rupiah)



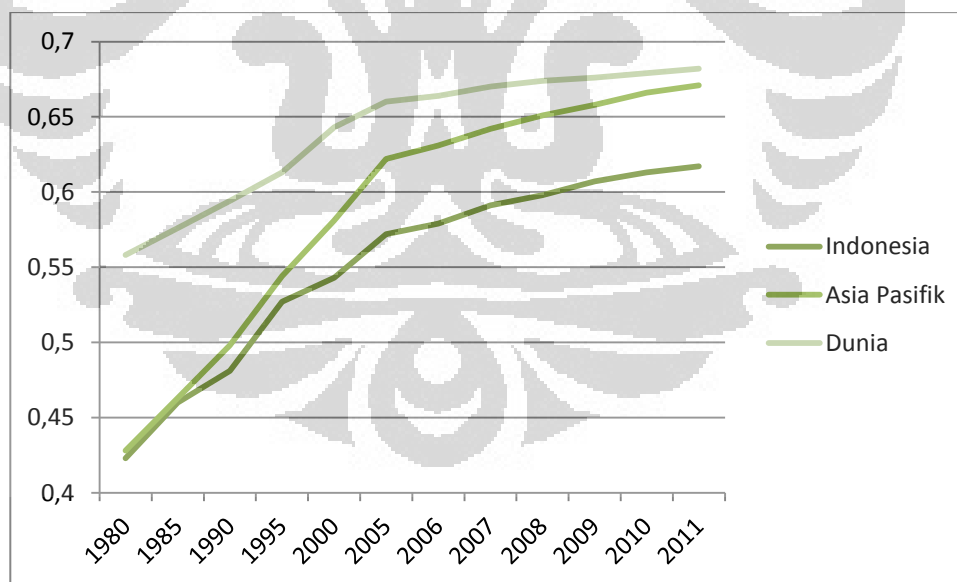
Sumber: Basis Data DJPK Kementerian keuangan, telah diolah kembali.

Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam 11 prioritas nasional. Terlebih lagi, pendidikan merupakan salah satu dimensi pengukuran dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). *Human development index* merupakan indeks kemajuan sosial dan ekonomi negara-negara yang diukur dari tiga dimensi yaitu pendidikan, dimensi kesehatan, dan standar hidup. Di Indonesia, dimensi pendidikan dalam indeks pembangunan manusia diukur dengan indikator angka melek huruf orang dewasa dan angka partisipasi kasar (*gross enrollment rate*) pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Angka melek huruf orang dewasa dan angka partisipasi kasar tersebut juga dianggap sebagai ukuran aksesibilitas pendidikan atau kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan (Tim Media Indonesia, 2011).

Indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2011 adalah 0,617. Angka tersebut menjadikan Indonesia ada pada peringkat 124 dari total 187 negara dengan data yang dapat dibandingkan (Tim *United Nations Development Programme*, 2011). Indeks pembangunan manusia sebesar 0,617 tersebut meningkat sebanyak 45,86% dibandingkan dengan tahun 1980 yang hanya sebesar 0,423.

Peningkatan pada indeks pembangunan manusia tersebut memang suatu pencapaian yang baik bagi Indonesia, namun bila dibandingkan dengan rata-rata yang dicapai oleh negara-negara di Asia Pasifik maupun di dunia, pencapaian indeks pembangunan manusia oleh Indonesia selalu dibawah rata-rata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel I.3. yang membandingkan tren indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 1980 – 2011 dengan tren rata-rata indeks pembangunan manusia pada negara-negara di Asia Pasifik maupun di seluruh dunia.

Tabel I.3. Tren Indeks Pembangunan Manusia Tahun 1980 – 2011



Sumber: Tim *United Nations Development Programme*, telah diolah kembali.

Penerapan otonomi daerah yang meliputi penyerahan urusan pemerintah daerah diikuti oleh sumber-sumber pendanaan dalam rangka desentralisasi. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis hubungan antara kebijakan

desentralisasi fiskal yang diwakili dengan sumber-sumber pendanaan penerapan otonomi daerah dengan peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kemudian menganalisis hubungan antara pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dengan peningkatan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian yang mengaitkan otonomi daerah maupun desentralisasi fiskal dengan pendidikan di Indonesia. Misalnya penelitian Priyono (2005) dengan penelitiannya yang berjudul *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Sukaesih (2008) dengan penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akses Pendidikan: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 1995-1997 dan 2003-2006*, dan Oktara (2010) dengan penelitiannya yang berjudul *Efek Otonomi Anggaran Terhadap Pendidikan: Studi Kasus Pada Lima Provinsi di Indonesia*.

Disamping penelitian-penelitian tersebut di atas terdapat pula penelitian yang dilakukan di luar negeri, misalnya oleh Qing dan Shi (2010) yang berjudul *Fiscal Decentralization and Public Education Provision in China* yang meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dan penyediaan pendidikan publik, dan penelitian Busemeyer (2007) yang berjudul *The Impact of Fiscal Decentralisation on Education and Other Types of Spending*.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia dalam 3 hal. Pertama, sampel dalam penelitian ini mewakili kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kedua, selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pendidikan, penelitian ini juga meneliti pengaruh desentralisasi fiskal melalui pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketiga, terdapat dua variabel *dummy* yaitu variabel *dummy* Pemerintah Kabupaten/Kota yang kaya dan yang miskin dengan indikator rata-rata produk domestik regional bruto per kapita untuk melihat apakah pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan akan lebih besar pada salah satu kondisi tersebut dan variabel *dummy* periode sebelum desentralisasi fiskal dan setelah desentralisasi fiskal.

Sesuai dengan uraian di atas, penelitian ini dibuat dengan judul “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal)”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota?
- b. Apabila meningkat, apakah peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat?
- c. Apakah kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat?
- d. Di daerah miskin dan di daerah kaya, apakah terdapat perbedaan peningkatan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat akibat peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota?
- e. Apakah kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat?

I.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan terhadap pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.

- c. Mendapatkan bukti empiris bahwa kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.
- d. Mendapatkan bukti empiris bahwa pengaruh pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap aksesabilitas pendidikan lebih besar pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih miskin.
- e. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai bahan evaluasi dan masukan mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga desentralisasi fiskal tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik terutama kebutuhan pendidikan.
- b. Bagi Masyarakat
Menyediakan sumber informasi dan bukti empiris mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dan hubungannya terhadap aksesabilitas pendidikan di Indonesia sehingga masyarakat dapat memahami pelaksanaan tersebut dan memberikan masukan yang membangun bagi pemerintah.
- c. Bagi Dunia Akademis
Memberikan kontribusi terhadap studi mengenai desentralisasi fiskal dengan memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya.

I.5 Batasan Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada data yang menggunakan sampel Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dan meliputi lima tahun pada periode sebelum desentralisasi fiskal dan lima tahun pada periode setelah desentralisasi fiskal.

I.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I berisi mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pemilihan topik desentralisasi fiskal, perumusan masalah, tujuan dan manfaat adanya penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

b. **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini, akan dibahas teori-teori yang berhubungan dengan desentralisasi fiskal dan penyediaan pelayanan publik khususnya pendidikan misalnya tentang otonomi daerah, desentralisasi, serta penelitian-penelitian sebelumnya tentang desentralisasi fiskal dan aksesabilitas pendidikan.

c. **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab III menjabarkan tentang metodologi penelitian yang digunakan, yaitu populasi dan pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, desain dan teknik penelitian, model penelitian, teknik analisis data, serta hipotesis penelitian.

d. **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab IV akan disajikan analisis dan pembahasan tentang masalah yang diteliti. Termasuk didalamnya akan dijabarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan.

e. **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai topik penulisan, keterbatasan dalam penelitian, serta memuat saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2005), otonomi daerah merupakan proses peralihan dari sistem dekonsentrasi menjadi sistem desentralisasi. Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dasar-dasar sistem hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu desentralisasi atau penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan tugas perbantuan atau pemberian tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah pada Undang-Undang tersebut adalah pada daerah tingkat II (tingkat Kabupaten dan Kota).

Kuncoro (2004) mengatakan bahwa sekalipun Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan suatu komitmen politik mengenai otonomi daerah, namun dalam praktek yang terjadi masih berupa sentralisasi (kendali dari pusat) yang

sangat dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia.

Bergulirnya era reformasi pada tahun 1998 berdampak pada tuntutan masyarakat akan pelaksanaan otonomi daerah yang seutuhnya. Akibat tuntutan tersebut, pemerintah menerbitkan dua Undang-Undang mengenai sistem pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diubah oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, otonomi daerah akhirnya benar-benar dicanangkan pemerintah pada tahun 2001. Hal tersebut menurut Widjaja (2005) dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah merubah paradigma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Kuncoro (2004) menyebutkan bahwa setelah otonomi daerah dicanangkan, pembangunan di daerah terutama pembangunan fisik maju dengan cukup pesat. Namun pada sisi lain, ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat juga menjadi sangat tinggi akibat dari pembangunan yang semakin besar tersebut. Ketergantungan fiskal dapat dilihat dari dominannya transfer Pemerintah Pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Relatif rendahnya kemandirian pembiayaan daerah tersebut dikhawatirkan oleh Widjaja (2005) mengakibatkan berbagai kegiatan pembangunan di daerah terancam gagal dan tidak berjalannya kegiatan perekonomian di tingkat daerah.

Tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2004) yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Pengertian desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desentralisasi fiskal secara lebih khusus dapat didefinisikan sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan.

Penelitian Dillinger (1994) dalam Hirawan (2007) tentang pelaksanaan desentralisasi di berbagai belahan dunia menemukan bahwa pemicu dilakukannya kebijakan desentralisasi fiskal adalah keinginan atau upaya untuk memperoleh layanan publik yang lebih baik. Menurut Mardiasmo (2004), desentralisasi diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat yang nyata. Manfaat yang pertama yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Manfaat yang kedua yaitu memperbaiki alokasi sumber daya

produktif melalui pemberian peran pengambil keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Terdapat beberapa pendapat mengenai desentralisasi fiskal, misalnya Litvack *et al* (1998) dalam Utama (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan pelayanan publik karena pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, dengan alasan:

- a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya.
- b. Pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
- c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk melakukan inovasi.

Sependapat dengan Litvack *et al* (1998), Innocents (2011) mengemukakan bahwa argumen dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah bahwa hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengeluaran dan peningkatan barang publik dengan mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya. Desentralisasi fiskal mengacu pada sistem antar pemerintah di mana keseimbangan kekuasaan harusnya bergerak ke arah sektor subnasional untuk administrasi dan tata kelola yang lebih baik.

Brennan dan Buchanan (1980) dalam Kyriacou dan Sagalés (2011) juga berpendapat bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kualitas pemerintah, yaitu dengan mendukung kompetisi antaryurisdiksi untuk menggali sumber daya fiskal sehingga membuat Pemerintah Daerah lebih responsif terhadap preferensi masyarakat.

2.2 Struktur Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka

pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi dicatat dalam APBD sedangkan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan tidak. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci hingga unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Struktur APBD terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah segala hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Jumlah pembiayaan pada APBD sama dengan jumlah surplus dan defisit tahun anggaran yang bersangkutan. Dikatakan surplus anggaran apabila terdapat selisih lebih antara pendapatan dan belanja daerah pada satu tahun anggaran, sedangkan apabila terdapat selisih kurang maka terjadi defisit anggaran.

2.3 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD dapat bersumber dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 melarang daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, serta kegiatan impor/ekspor.

Pada kenyataannya beberapa daerah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan PAD tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi di daerah tersebut dan mengabaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan menetapkan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang terlalu tinggi.

2.3.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Dana perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil.
- b. Dana Alokasi Umum.
- c. Dana Alokasi Khusus.

2.3.2.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas beberapa pendapatan pajak berikut ini:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.

Pendapatan yang bersumber dari PBB dan BPHTB sebagian besar dialokasikan sebagai dana bagi hasil untuk Pemerintah Daerah yaitu sebesar 80-90%. Sedangkan 80% pendapatan yang bersumber dari PPh pasal 21, 25, dan 29 dialokasikan ke Pemerintah Pusat dan sebesar 20% dialokasikan sebagai dana bagi hasil untuk Pemerintah Daerah.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam dan alokasinya dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1. Alokasi DBH Sumber Daya Alam

No.	Sumber Daya Alam	Persentase Pemerintah Pusat	Persentase Pemerintah Daerah
1a.	Kehutanan- iuran hak pengusahaan hutan dan provisi	20%	80%
1b.	Kehutanan- dana reboisasi	60%	40%
2	Pertambangan umum	20%	80%
3	Perikanan	20%	80%
4	Pertambangan minyak bumi	84,5%	15,5%
5	(Sambungan) Pertambangan gas bumi	69,5%	30,5%
6	Pertambangan panas bumi	80%	20%

Sumber: Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, telah diolah kembali.

2.3.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (selanjutnya disebut DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

DAU merupakan suatu instrumen transfer ke daerah yang bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah sekaligus pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (*equalization grant*), dan dialokasikan dalam bentuk *block grant*. Alokasi dalam bentuk *block grant* berarti DAU tidak terikat dalam kriteria khusus dari Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah dapat dengan leluasa menggunakan dana tersebut.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan DAU adalah alokasi dasar ditambah dengan kesenjangan atau celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)} \quad (2.1)$$

Keterangan:

AD: Gaji PNS di Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

2.3.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan daerah.

2.3.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Lain-lain pendapatan dapat berasal dari pendapatan hibah yang merupakan bantuan yang tidak mengikat dan pendapatan dana darurat yang dapat diperoleh Pemerintah Daerah apabila terdapat keperluan mendesak yang diakibatkan oleh krisis solvabilitas, bencana nasional, dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

2.4 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Anggaran belanja pada APBD diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

2.4.1 Klasifikasi Menurut Organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Daerah.

2.4.2 Klasifikasi Menurut Fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari:

- a. Pelayanan umum.
- b. Ketertiban dan keamanan.
- c. Ekonomi.
- d. Lingkungan hidup.

- e. Perumahan dan fasilitas umum.
- f. Kesehatan.
- g. Pariwisata dan budaya.
- h. Agama.
- i. Pendidikan.
- j. Perlindungan sosial.

2.4.3 Klasifikasi Menurut Program dan Kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.4.4 Klasifikasi Menurut Jenis Belanja

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja barang dan jasa.
- c. Belanja modal.
- d. Bunga.
- e. Subsidi.
- f. Hibah.
- g. Bantuan sosial.
- h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- i. Belanja tidak terduga.

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja harus disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.5 Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

United Nations Development Programme (UNDP) merupakan organisasi di bawah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini bertujuan untuk membangun jaringan pembangunan global dan berperan sebagai agen perubahan untuk mendukung pembangunan manusia serta bertujuan untuk membantu masyarakat agar mendapat kehidupan yang lebih baik.

Setiap tahunnya, UNDP mengeluarkan *Human Development Report* atau Laporan Pembangunan Manusia dimulai sejak tahun 1990. Laporan ini merupakan publikasi yang independen dan bertujuan untuk meletakkan manusia sebagai fokus pembangunan serta mengukur kesejahteraan manusia dengan ukuran yang lebih baik daripada hanya sekedar ukuran pendapatan. Saat ini Laporan Pembangunan Manusia telah disajikan oleh lebih dari 140 negara di dunia dan digunakan secara luas sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Untuk mengukur kesejahteraan manusia dengan ukuran yang lebih luas dari sekedar ukuran pendapatan, Laporan Pembangunan Manusia menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengukur kemajuan rata-rata suatu negara dalam kerangka pembangunan manusia. Indeks tersebut menjadi ukuran standar dalam menyajikan Laporan Pembangunan Manusia sehingga pencapaian pembangunan suatu negara dapat dibandingkan dengan negara lainnya. Pencapaian pembangunan negara-negara yang terdaftar dalam program UNDP dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu negara dengan tingkat pembangunan yang sangat tinggi (*very high human development*), negara dengan tingkat pembangunan yang tinggi (*high human development*), negara dengan tingkat pembangunan yang sedang (*medium human development*), dan negara dengan tingkat pembangunan yang rendah (*low human development*). Saat ini Indonesia berada pada kelompok negara dengan tingkat pembangunan yang sedang bersama 46 negara lainnya.

Dalam mengukur pencapaian rata-rata pembangunan manusia di suatu negara, Indeks Pembangunan Manusia menggunakan tiga dimensi pengukuran yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup.

2.6 Aksesabilitas Pendidikan oleh Masyarakat dalam Dimensi Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan, sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hak asasi setiap manusia. Hal tersebut berarti bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Ukuran aksesabilitas pendidikan dimaksudkan untuk mengukur seberapa merata layanan pendidikan di suatu wilayah dapat diperoleh masyarakat. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan merupakan salah satu dimensi pengukuran disamping kesehatan dan standar hidup. Dimensi pendidikan dalam IPM menunjukkan seberapa baik masyarakat mendapatkan pendidikan di suatu negara.

Hingga tahun 2009, ukuran yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung dimensi pendidikan IPM yaitu *adult literacy rate* atau tingkat melek huruf usia 15 tahun keatas dan *combined primary, secondary, and tertiary gross enrollment ratio* atau Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat primer, sekunder, dan tersier. APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Kelompok usia tersebut adalah 7-12 tahun untuk sekolah dasar, 13-15 tahun untuk sekolah menengah pertama, 16-18 tahun untuk sekolah menengah, dan 19-24 tahun untuk perguruan tinggi. Tingkat melek huruf dan APK dikatakan oleh UNDP merupakan ukuran aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat (Tim UNDP, 2010). Ukuran aksesabilitas pendidikan pada penelitian ini untuk selanjutnya akan mengikuti pengukuran oleh UNDP tersebut.

Pada Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2010, UNDP memperkenalkan indikator-indikator baru dalam pengukuran IPM. Pada dimensi pendidikan, *lama rata-rata sekolah (mean years of schooling)* dan *lama harapan sekolah (expected years of schooling)* menggantikan *adult literacy rate* dan *combined primary, secondary, and tertiary gross enrollment ratio*. Dengan perubahan indikator ini, UNDP mengharapkan dimensi pendidikan dalam IPM dapat mengukur kualitas pendidikan di suatu negara dengan lebih baik. Indikator-indikator baru dalam pengukuran IPM tersebut digunakan pada Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2010 dan Laporan Pembangunan Manusia tahun-tahun berikutnya.

2.7 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat di suatu negara dapat diukur melalui indikator ekonomi dan sosial. Kuncoro (2010) menyatakan bahwa yang termasuk dalam

indikator ekonomi dalam mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu *Gross National Income* (Produk Nasional Bruto) per kapita dan *Gross Domestic Product* (Produk Domestik Bruto) per kapita, dan yang termasuk dalam indikator sosial yaitu *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia) dan *Physical Quality Life Index* (Indeks Mutu Hidup). Apabila ukuran kesejahteraan masyarakat digunakan untuk membandingkan pencapaian antar negara, GNP per kapita dan GDP per kapita sebaiknya dikonversi ke dalam satu mata uang yang sama (*US dollar*) dengan mengukur daya beli relatif negara tersebut dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Hasil konversi GNP per kapita dan GDP per kapita tersebut disebut GNP per kapita dan GDP per kapita dengan *Purchasing Power Parity* (Hakim, 2010).

2.8 Peraturan Terkait Otonomi Daerah

2.8.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disusun untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi tersebut dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintah Daerah. Masing-masing Pemerintah Daerah mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah otonom tersebut dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain dapat dihapus dan digabung, pembentukan daerah juga dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah yang memimpin Provinsi disebut Gubernur, yang memimpin Kabupaten disebut Bupati, dan yang memimpin Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung dan demokratis melalui pemilihan umum oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota yaitu meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan.

Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban dan hak. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k. Melestarikan lingkungan hidup.
- l. Mengelola administrasi kependudukan.
- m. Melestarikan nilai sosial budaya.
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak yang didapatkan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah meliputi:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan-hubungan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

2.8.2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah didasari atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan dalam APBD. Keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Siklus APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengendalian, serta pengawasan dan pemeriksaan.

Berikut adalah penjabaran mengenai siklus APBD tersebut:

1. Perencanaan APBD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD tersebut merupakan dasar penyusunan rancangan APBD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang disiapkan oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Oleh DPRD, kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah tersebut kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian, DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan. Apabila rancangan APBD tersebut telah disetujui bersama, maka rancangan APBD akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

2. Pelaksanaan APBD

Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Apabila Peraturan Daerah mengenai APBD tidak disetujui DPRD, maka untuk membiayai keperluan daerahnya Pemerintah Daerah hanya dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

Untuk mencairkan dana, Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pengguna Anggaran baru dapat melaksanakan kegiatan setelah dokumen pelaksanaan anggaran telah disahkan.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD. Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum daerah. Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tersebut tidak dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Daerah dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum dan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan tersebut dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Apabila dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya. Belanja tersebut dapat diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Perubahan APBD tersebut ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran dan hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

3. Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan

yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keuangan yang disampaikan setidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara.

4. Pengendalian APBD

Menteri Keuangan berwenang menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD. Jumlah kumulatif defisit APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan. Setiap tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan defisit APBD akan berdampak dikenakannya sanksi berupa penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

5. Pengawasan dan Pemeriksaan APBD

Pengawasan dan pemeriksaan APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

2.9 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dan pendidikan telah dilakukan sebelumnya. Beberapa diantara penelitian tersebut terangkum pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya

No.	Penelitian	Subyek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah (Edy Priyono, 2005).	245 Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2002.	PAD dan dana perimbangan berhubungan positif dengan pengeluaran pendidikan.

2	<p>(Sambungan)</p> <p>Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akses Pendidikan Studi Kasus Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 1995-1997 dan 2003-2006 (Mamay Sukaesih, 2008).</p>	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota. • Pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap <i>Gross Enrollment Rate</i> SD, SLTP, dan SLTA. • Kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap <i>Gross Enrollment Rate</i> SD, SLTP, dan SLTA.
3	<p>The Effects of Decentralization on Education in Indonesia: Education for All (Melva Samosir, 2008).</p>	<p>Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memenuhi kebutuhan publik misalnya pendidikan, Pemerintah Daerah tidak selalu menunggu <i>special purpose grant</i> (DAK) untuk memenuhinya, Pemerintah Daerah dapat menggunakan <i>block grant</i> (DAU) yang bebas digunakan dibawah kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. • Desentralisasi fiskal merupakan cara untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

4	<p>(Sambungan)</p> <p><i>Evaluation Of Decentralization Outcomes In Indonesia: Analysis Of Health And Education Sectors</i></p> <p>(Rentanida Renata Simatupang, 2009).</p>	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.</p>	<p>Setelah era kebijakan desentralisasi fiskal, keluaran pendidikan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Keluaran pendidikan di Indonesia tersebut diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingkat melek huruf, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat <i>drop out</i> .</p>
5	<p>Efek Otonomi Anggaran Terhadap Pendidikan : Studi Kasus Pada Lima Provinsi di Indonesia (Beny Trias Oktara, 2010).</p>	<p>Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Riau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada periode desentralisasi fiskal, korelasi antara pengeluaran pendidikan dan angka partisipasi sekolah pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua signifikan negatif. • Pengeluaran pendidikan dan angka partisipasi sekolah pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Riau memiliki korelasi positif yang relatif lemah.

6	(Sambungan) <i>Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries: Implications for Achieving the MDGs</i> (Emanuele Baldacci, Benedict Clements, Sanjeev Gupta, dan Qiang Cui, 2004).	120 negara berkembang periode tahun 1975-2000.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendapatan (diukur dengan GDP per kapita) berpengaruh signifikan pada <i>education capital</i> (diukur dengan APK (<i>gross enrollment rate</i>)). • Pengeluaran pendidikan berpengaruh signifikan pada <i>education capital</i>.
7	<i>The Impact of Fiscal Decentralisation on Education and Other Types of Spending</i> (Marius R. Busemeyer, 2007).	21 negara yang termasuk dalam OECD periode tahun 1980-2001.	Desentralisasi fiskal berhubungan signifikan positif dengan pengeluaran publik di bidang pendidikan.
8.	<i>Fiscal Decentralization and Public Education Provision in China</i> (Luo Wei-qing dan Chen Shi, 2010).	Seluruh daerah otonom di Cina kecuali Taiwan, Hongkong and Macau dan Kota Beijing, Tianjin, Shanghai and Chongqing.	Desentralisasi fiskal menurunkan penyediaan pendidikan masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

2.10 Hipotesis Penelitian

Penelitian mengenai hubungan antara kebijakan desentralisasi fiskal dan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang otonom telah beberapa kali diteliti sebelumnya. Penelitian Busemeyer (2007), yang meneliti 21 Negara yang tergabung dalam OECD dengan periode tahun 1980-2001, menghasilkan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan signifikan positif dengan pengeluaran publik di bidang pendidikan. Argumen Busemeyer dalam hasil

penelitian tersebut adalah karena tendensi Pemerintah Daerah adalah untuk berlomba-lomba dalam hal penyediaan barang publik (*race to the top*). Penyediaan barang publik tersebut, menurut Bussemeyer ditujukan untuk menarik simpati masyarakat yang merupakan pemilih (*voters*) perangkat kepemimpinan daerah otonom.

Penelitian yang menghasilkan kesimpulan sebaliknya dilakukan oleh Qing dan Shi (2010) yang melakukan penelitian pada seluruh daerah otonom di Cina kecuali Taiwan, Hongkong and Macau dan Kota Beijing, Tianjin, Shanghai and Chongqing. Kesimpulan penelitian Qing dan Shi adalah bahwa desentralisasi fiskal menurunkan penyediaan pendidikan masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dijelaskan oleh Zhou (2007) dalam Qing dan Shi (2010) diakibatkan oleh besarnya pemberian wewenang untuk melakukan pengeluaran dan penerimaan pada daerah otonom namun keputusan pemilihan tidak berada pada masyarakat lokal. Daerah otonom di Cina cenderung untuk memaksimalkan pencapaian politik dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan publik masyarakat daerah khususnya pendidikan. Perlombaan tiap-tiap daerah otonom di Cina pada akhirnya menghasilkan *yard-stick competition* antardaerah.

Dalam menganalisa hubungan antara kebijakan desentralisasi dan pengeluaran pendidikan di Indonesia, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sukaesih (2008) dan Priyono (2005). Priyono (2005) yang meneliti 245 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2002, menyimpulkan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana perimbangan berhubungan signifikan positif terhadap pengeluaran pendidikan. Sukaesih (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa DAU (Dana Alokasi Umum) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

H1a: PAD berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

H1b: DAK berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

H1c: DAU berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Hipotesis yang diajukan selanjutnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesejahteraan masyarakat dengan pengeluaran pendidikan. Dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat diukur dengan *dummy* rata-rata PDRB. Diduga bahwa kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dengan pengeluaran pendidikan. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa pada daerah miskin, alokasi pengeluaran pendidikan menjadi tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan alokasi untuk pengeluaran lainnya. Pemikiran tersebut didukung oleh penelitian Baldacci, Clements, Gupta dan Cui (2004) yang menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat (dalam penelitian tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB per kapita) berhubungan positif dengan pengeluaran pendidikan. Hal tersebut terjadi karena tingginya permintaan akan pendidikan akan lebih mungkin terjadi pada daerah yang lebih kaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, hipotesis yang diajukan berikutnya yaitu:

H2: Kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Setelah mengajukan hipotesis yang bertujuan untuk meneliti hubungan beberapa variabel bebas dengan variabel terikat pengeluaran pendidikan, hipotesis-hipotesis selanjutnya akan meneliti hubungan beberapa variabel bebas dengan variabel terikat aksesabilitas pendidikan.

Penelitian Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui (2004) yang meneliti 120 negara berkembang menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran pendidikan berpengaruh signifikan pada *education capital* yang diukur dengan *proxy* APK (Angka Partisipasi Kasar). Senada dengan hasil penelitian Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui, di Indonesia terdapat penelitian Sukaesih (2008) yang meneliti Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Sukaesih menggunakan ukuran angka partisipasi kasar sebagai indikator aksesabilitas pendidikan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap angka partisipasi kasar SD, SLTP, dan SLTA.

Berbeda dengan penelitian Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui (2004) dan Sukaesih (2008) tersebut, penelitian ini menggunakan pengukuran aksesabilitas pendidikan yang juga digunakan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) untuk menyusun indeks pembangunan manusia dari aspek pendidikan sejak tahun 1990 hingga tahun 2009 yaitu *adult literacy rate* atau tingkat keaksaraan masyarakat (tingkat melek huruf) usia 15 tahun keatas dan *combined primary, secondary, and tertiary gross enrollment ratio* atau Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis berikutnya adalah:

H3: Pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.

Kesejahteraan masyarakat telah disebutkan sebelumnya berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan. Oleh karena itu, dapat pula diyakini bahwa kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan. Selain karena permintaan akan pendidikan yang lebih tinggi pada daerah yang lebih kaya, hal tersebut diyakini karena pembangunan (terutama infrastruktur) yang cenderung lebih memadai di suatu daerah yang tergolong kaya sehingga akan mendukung terselenggaranya pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal.

Mendukung pemaparan di atas, penelitian Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui (2004) menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan (diukur dengan PDB per kapita) berpengaruh signifikan pada *education capital* (diukur dengan angka partisipasi kasar atau *gross enrollment rate*).

Hipotesis untuk meneliti hubungan antara kesejahteraan masyarakat dengan aksesabilitas pendidikan adalah:

H4a: Kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.

H4b: Pengaruh belanja pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan lebih besar pada daerah kaya dibandingkan dengan pengaruh belanja pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin.

Hipotesis terakhir yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara kebijakan desentralisasi dengan aksesabilitas pendidikan. Penyusunan hipotesis ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa selain berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan, kebijakan desentralisasi fiskal seharusnya juga berpengaruh positif dengan aksesabilitas pendidikan.

Penelitian Sukaesih (2008) menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal mempengaruhi aksesabilitas pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar. Sependapat dengan Sukaesih, Samosir (2008) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat memperluas aksesabilitas pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, hipotesis terakhir dalam penelitian ini adalah:

H5: Kebijakan desentralisasi fikal berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Sampel yang dipilih adalah Pemerintah Kabupaten/Kota pada rentang tahun 1996-2000 (untuk mewakili era sebelum kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan) dan tahun 2005-2009 (untuk mewakili era kebijakan desentralisasi fiskal). Setelah dilakukan rekapitulasi data penelitian, jumlah sampel *cross section* yang terkumpul adalah 283 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini terdapat dua model penelitian. Untuk model pengeluaran pendidikan, yang digunakan sebagai sampel adalah data pada 282 Pemerintah Kabupaten/Kota pada era kebijakan desentralisasi fiskal yaitu tahun 2005-2009 dengan total 1156 observasi. Pemilihan rentang waktu tersebut dilakukan mengingat dua variabel bebas yang digunakan yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang menjadi ciri khusus kebijakan desentralisasi fiskal dan tidak ada sebelum kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan.

Sedangkan, sampel yang digunakan untuk model aksesibilitas pendidikan adalah data pada 276 Pemerintah Kabupaten/Kota pada rentang tahun 1996-2000 (untuk mewakili era sebelum kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan) dan tahun 2005-2009 (untuk mewakili era kebijakan desentralisasi fiskal) dengan total 2485 observasi.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan meninjau literatur-literatur yang telah ada

dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut berupa buku cetak, jurnal, skripsi, majalah, situs internet, dan sebagainya. Tujuan dari studi literatur menurut Sekaran (2003) adalah untuk memastikan bahwa tidak ada variabel penting mengenai suatu masalah dalam penelitian yang terlewatkan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengikhtisarkan seluruh data sekunder terkait penelitian yang diperoleh dari sumber data baik berupa data yang dipublikasikan maupun data yang tidak dipublikasikan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data terkait realisasi APBD yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pengeluaran pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari publikasi internet dan basis data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk data mengenai angka partisipasi kasar, angka melek huruf, dan pendapatan domestik regional bruto didapatkan dari ikhtisar statistik Badan Pusat Statistik.

3.4 Model Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data panel. Data panel menurut Nachrowi dan Usman (2006) merupakan data yang dikumpulkan dari banyak individu dari waktu ke waktu. Data panel merupakan gabungan dari data *cross-section* dan *time series*.

Gujarati (2004) mengatakan bahwa pada data panel, unit *cross-section* yang sama diobservasi dalam beberapa periode waktu sehingga data panel memiliki dimensi ruang dan waktu. Apabila tiap unit *cross-section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama maka data panel tersebut dinamakan data panel seimbang (*balanced panel data*), sedangkan apabila jumlah pengamatan *time series* berbeda pada tiap unit maka disebut data panel tidak seimbang (*unbalanced panel data*) (Yuniarti, 2010).

Wibisono (2005) dalam Ajija, Sari, Setianto, dan Primanti (2011) mengatakan bahwa data panel dapat secara substansial menurunkan masalah *omited-variables* dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross-section* maupun *time series*. Metode data panel mempunyai empat keunggulan, yaitu:

1. Data panel dapat memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik tiap individu.
2. Data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Banyaknya jumlah observasi data panel menjadikan hasil estimasi lebih efisien karena data lebih informatif dan variatif, kolinearitas antar variabel semakin berkurang, dan derajat kebebasan data lebih meningkat.
4. Data panel mampu meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Verbek (2000), Gujarati (2003), Wibisono (2005), dan Aulia (2004) dalam Ajija, Sari, Setianto dan Primanti (2011) mengatakan bahwa keunggulan-keunggulan tersebut di atas berimplikasi pada tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik pada model data panel.

Pemodelan dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan korelasi antara variabel independen dan variabel dependen sehingga metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi. Model regresi data panel secara umum dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006):

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}, i = 1,2, \dots, N; t = 1,2, \dots, T \quad (3.1)$$

Keterangan:

N = jumlah observasi

T = jumlah waktu

N X T = banyaknya unit data panel

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Model Pengeluaran Pendidikan

$$BPEND = \alpha + \beta PAD_{it} + \beta DAU_{it} + \beta DAK_{it} + \beta WEALTH_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

2. Model Aksesabilitas Pendidikan

$$EDU = \alpha + \beta BPEND_{it} + \beta WEALTH_{it} + \beta FD_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.3)$$

Model pengeluaran pada persamaan 3.2 ditujukan untuk mengetahui korelasi antara kebijakan desentralisasi fiskal (yang diwakili dengan ketiga variabel yaitu PAD, DAU, dan DAK pendidikan) dengan besaran pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (BPEND) dan model aksesabilitas pendidikan pada persamaan 3.3 terutama ditujukan untuk mengetahui korelasi antara pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat (EDU).

Ukuran tingkat aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat (EDU) pada penelitian ini menggunakan ukuran aksesabilitas pendidikan yang digunakan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*), yaitu dengan rumus:

$$\left(\frac{1}{3} \times \overline{APK}\right) + \left(\frac{2}{3} \times AMH\right) \quad (3.4)$$

dengan keterangan:

\overline{APK} : rata-rata angka partisipasi kasar (laki-laki dan perempuan) atau *combined gross enrolment rate* tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi

AMH : angka melek huruf (*literacy rate*)

Untuk memudahkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, Tabel 3.1. menyajikan secara ringkas definisi operasional variabel tersebut.

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

No	Notasi	Definisi	Bentuk Variabel	Satuan
1	BPEND	Pengeluaran pendidikan.	Realisasi belanja pendidikan.	Rupiah
2	EDU	Indikator aksesabilitas pendidikan.	Angka melek huruf dewasa (usia di atas 15 tahun) dan angka partisipasi kasar kombinasi laki-laki dan perempuan tingkat SD, SMP, SMA, dan Universitas.	Persentasi
3	PAD	Pendapatan asli daerah.	Realisasi pendapatan asli daerah.	Rupiah
4	DAU	Dana alokasi umum.	Realisasi dana alokasi umum.	Rupiah
5	DAK	Dana alokasi khusus.	Realisasi dana alokasi khusus pendidikan.	Rupiah
6	FD	Desentralisasi fiskal	<i>Dummy</i> desentralisasi fiskal Tahun 1996-2000 (sebelum desentralisasi fiskal) = 0. Tahun 2005-2009 (desentralisasi fiskal) = 1.	-
7	WEALTH	Kesejahteraan Daerah (untuk menentukan kategori miskin/kaya)	<i>Dummy</i> rata-rata pendapatan domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku. Dibawah rata-rata PDRB per kapita (daerah miskin) = 0. diatas rata-rata PDRB per kapita (daerah kaya) = 1.	-

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak *EViews 7.1* dan *SPSS 17.0*. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis statistika deskriptif, analisis pemilihan model regresi, dan uji hipotesis.

3.5.1 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif ditujukan untuk memberi gambaran mengenai data penelitian misalnya nilai minimum, nilai maksimum, nilai tengah, dan nilai rata-rata. Analisis statistika deskriptif tidak dimaksudkan untuk penarikan kesimpulan dan dapat disajikan dengan tabel dan grafik.

3.5.2 Metode Regresi Data Panel

Dalam Ajija, Sari, Setianto, Primanti (2010) terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam menganalisis regresi data panel yaitu sebagai berikut:

1. *Pooled Least Square (PLS)/Common Effect Model (CEM)*

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana. Pendekatan ini menggabungkan seluruh data *time series* dan *cross-section*. Dalam CEM, parameter penelitian diestimasi menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*.

Model data panel dalam pendekatan ini adalah (Gujarati, 2003):

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it} \quad (3.5)$$

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Pendekatan ini merupakan pendekatan regresi dengan menggunakan *dummy variable* sebagai variabel bebas. FEM memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted variable* yang dapat membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross-section*.

Model data panel dalam pendekatan ini adalah (Gujarati, 2003):

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it} \quad (3.6)$$

3. *Random Effect Model* (REM)

Dengan pendekatan ini, perbedaan antar individu dan atau waktu diakomodasi lewat *error*. Pada REM, *error* diasumsikan *random* dan diestimasi dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). REM juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross-section*.

Model data panel dalam pendekatan ini adalah (Gujarati, 2003):

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} + \mu_{it} \quad (3.7)$$

Disampaikan oleh Sukendar dan Zainal (2007) dalam Yuniarti (2010), untuk memperoleh model yang tepat dalam regresi panel, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan uji Chow pada hasil estimasi FEM untuk dibandingkan dengan hasil estimasi CEM. Apabila terbukti ada efek individu maka dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman untuk menentukan antara FEM dan REM.
2. Jika dari hasil uji Hausman diperoleh bahwa metode yang sesuai adalah model FEM maka dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengetahui apakah pada model FEM terdapat heteroskedastisitas.
3. Jika dari hasil uji LM terbukti terdapat heteroskedastisitas maka model FEM akan diestimasi dengan *weighted: Cross-section weight*.

3.5.2.1 Uji Chow

Uji Chow dapat digunakan untuk menentukan pemilihan model antara FEM dan CEM. Hipotesis uji Chow menurut Greene (2000) dalam Yuniarti (2010) adalah sebagai berikut:

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_N = \alpha$ (model CEM)

H_1 : sekurang-kurangnya ada satu *intercept* (α_{it}) yang tidak sama (model FEM)

dengan statistik uji sebagai berikut (Baltagi, 1999):

$$CHOW = \frac{(RSS_1 - RSS_2)(N-1)}{(RSS_2) / (NT - N - K)} \quad (3.8)$$

Keterangan:

RSS_1 = residual sum of squares teknik CEM

RSS_2 = residual sum of squares teknik FEM

N = jumlah unit *cross-section*

T = jumlah data *time series*

K = jumlah variabel independen

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan $F_{tabel} = F_{(N-1, NT-N-K, \alpha)}$ maka H_0 ditolak, yang artinya model yang digunakan adalah FEM.

3.5.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan penggunaan FEM atau REM. Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman menurut Greene (2000) dalam Yuniarti (2010):

$H_0: \text{corr}(X_{it}, u_{it}) = 0$ (model REM)

$H_1: \text{corr}(X_{it}, u_{it}) \neq 0$ (Model FEM)

dengan statistik uji:

$$W = \chi^2(K) - (b - \hat{\beta}) [\text{var}(b) - \text{var}(\hat{\beta})]^{-1} (b - \hat{\beta}) \quad (3.9)$$

Keterangan:

b = vektor estimasi parameter FEM

$\hat{\beta}$ = vektor estimasi parameter REM

Jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(K; \alpha)}$ maka H_0 ditolak dan yang digunakan adalah model FEM.

3.5.2.3 Uji Lagrange Multiplier (Uji LM)

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui apabila terdapat heteroskedastisitas pada model FEM. Hipotesis yang digunakan menurut Greene (2000) dalam Yuniarti (2010) adalah sebagai berikut:

$H_0: \sigma_i^2 = \sigma^2$ (struktur homoskedastik)

$H_1: \sigma_i^2 \neq \sigma^2$ (struktur heteroskedastik)

dengan statistik uji:

$$LM = \frac{T}{2} \sum_{i=1}^N \left[\frac{\hat{\sigma}_i^2}{\hat{\sigma}^2} - 1 \right]^2 \quad (3.10)$$

Keterangan:

T : jumlah unit *time series*

N : jumlah unit *cross-section*

$\hat{\sigma}_i^2$: varians residual persamaan ke-*i*

$\hat{\sigma}^2$: varians residual persamaan *system*

Jika $\chi^2_{hit} > \chi^2_{(N-1;\alpha)}$ maka H_0 ditolak dan berarti bahwa model FEM memiliki struktur heteroskedastisitas sehingga harus diestimasi dengan metode *weighted: cross-section weight*.

3.5.3 Uji Hipotesis

Nachrowi dan Usman (2006) mendefinisikan uji hipotesis sebagai uji yang bertujuan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji. Terdapat tiga jenis pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu dengan uji-F, uji-t, dan uji *goodness of fit* (R^2).

3.5.3.1 Uji-F

Uji-F menguji model secara keseluruhan untuk melihat apakah semua koefisien regresi dalam model berbeda dengan 0 (model diterima) atau sama dengan 0 (model tidak diterima). Uji-F dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hit} dengan F tabel. Apabila $F_{hit} > F$ tabel, maka H_0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak ada satu *slope* regresi yang signifikan secara statistik (Nachrowi dan Usman, 2006).

Selain dengan membandingkan F_{hit} dengan F tabel, terdapat cara yang lebih mudah untuk uji-F yaitu dengan membandingkan α dengan *p-value* yang dihasilkan oleh tabel output aplikasi statistika. Jika nilai *p-value* $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3.5.3.2 Uji-t

Uji-t bertujuan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Dengan pengujian ini, dapat diketahui apakah suatu variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel terikat atau tidak.

Cara melakukan uji-t mirip dengan uji-F. Uji-t dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hit} dengan t tabel. Apabila $t_{hit} > t$ tabel atau $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas tersebut memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan variabel terikat.

3.5.3.3 Uji *Goodness of Fit* (R^2)

Goodness of fit atau koefisien determinasi (R^2) menurut Nachrowi dan Usman (2006) adalah suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi.

Nilai koefisien determinasi atau R^2 menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Apabila nilai $R^2 = 0$, maka berarti bahwa variasi dari variabel terikat sama sekali tidak dapat diterangkan oleh variabel bebas. Sebaliknya bila nilai $R^2 = 1$, maka variasi dari variabel terikat dapat dengan sempurna diterangkan oleh variabel bebas. Dalam kondisi tersebut, semua titik pengamatan akan berada tepat pada garis regresi (Nachrowi dan Usman, 2006).

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat menyediakan informasi atau gambaran umum mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian. Namun, informasi yang dihasilkan dari statistik deskriptif tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan (Siagian dan Sugiarto, 2002).

Tabel 4.1. dan 4.2 merangkum hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini. Data-data dalam penelitian ini dideskripsikan secara statistik dengan membaginya menjadi dua kelompok, yaitu data-data pada periode sebelum desentralisasi fiskal dan periode desentralisasi fiskal. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan perbandingan antara keduanya.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Data Periode Sebelum Desentralisasi Fiskal

	MIN	MAX	MEAN	SD
BPEND	1.029.416	34.857.732.346	2.920.986.105	2.874.042.384
PAD	836.730	253.900.325.446	7.827.758.120	15.516.031.546
EDU	30	97	78	9

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Data Periode Desentralisasi Fiskal

	MIN	MAX	MEAN	SD
BPEND	132.599.266	897.646.324.648	187.230.785.347	120.210.533.641
PAD	1.497.070.000	759.801.041.723	45.711.715.062	63.690.571.723
DAU	54.286.000.000	989.246.000.000	357.335.935.345	162.763.512.432
DAK	1.000.000.000	68.373.000.000	13.340.971.004	10.374.344.904
EDU	37	100	83	7

Rata-rata pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Daerah mengalami peningkatan sebanyak 6409% pada periode desentralisasi fiskal. Nilai minimal pengeluaran pendidikan yang pada periode sebelum desentralisasi fiskal hanya Rp. 1,029,416.00 meningkat jauh lebih tinggi menjadi Rp. 132,599,266.00 pada periode desentralisasi fiskal. Peningkatan nilai minimum tersebut adalah sebesar 12881%.

Nilai minimum pada pendapatan asli daerah selama periode sebelum desentralisasi fiskal adalah sebesar Rp. 836,730. Setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, nilai minimum pendapatan asli daerah meningkat sebesar 178919% yaitu Rp. 1,497,070,000.00. Nilai maksimal pendapatan asli daerah pada periode desentralisasi fiskal meningkat 300% dari nilai maksimal pada periode sebelum desentralisasi fiskal. Nilai rata-rata pendapatan asli daerah pada periode desentralisasi fiskal juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 583%.

Nilai minimum, maksimal, dan rata-rata aksesabilitas pendidikan yang dinotasikan dengan EDU mengalami sedikit peningkatan pada periode desentralisasi fiskal. Namun, standar deviasi yang menunjukkan penurunan pada periode desentralisasi justru merupakan pertanda baik. Standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa keragaman data yang diteliti kecil, sehingga standar deviasi data aksesabilitas pendidikan menunjukkan bahwa aksesabilitas pendidikan pada periode desentralisasi fiskal lebih merata dibandingkan dengan sebelum periode desentralisasi fiskal.

Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus adalah bagian dari dana perimbangan yang menjadi suatu ciri dari penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui tabel 4.2. di atas dapat dilihat bahwa proporsi dana alokasi khusus pendidikan masih sangat kecil dibandingkan dana alokasi umum. Dana alokasi umum memiliki nilai minimal Rp. 54.286.000.000,00 dan nilai maksimum Rp. 989.246.000.000,00 sedangkan dana alokasi khusus pendidikan Rp. 1.000.000.000,00 dan Rp. 68.373.000.000. Rata-rata dana alokasi umum dan dana alokasi khusus adalah Rp. 357.335.935.345,00 dan Rp. 13.340.971.004,00.

Tabel 4.3. Beda Rata-Rata dengan Kategori WEALTH

VARIABEL	KATEGORI WEALTH	RATA-RATA	SIGNIFIKANSI UJI BEDA RATA-RATA
BPEND	KAYA	90.049.196.222	0,000*
	MISKIN	76.682.574.075	
EDU	KAYA	77%	0,000*
	MISKIN	75%	

*signifikan pada taraf signifikansi 1%

Tabel 4.3. di atas menunjukkan perbedaan rata-rata pengeluaran pendidikan dan indikator aksesabilitas pendidikan dengan kategori daerah kaya dan miskin (WEALTH 1 dan 0). Signifikansi uji beda rata-rata kedua variabel tersebut dengan kategori daerah kaya dan miskin menunjukkan *p-value* 0.000 atau dapat dikatakan signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 1%. Output aplikasi SPSS uji beda kedua variabel tersebut dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran II.

Rata-rata pengeluaran pendidikan (BPEND) di daerah kaya (dengan WEALTH 1) yaitu Rp. 90.049.196.222,00 sedangkan di daerah miskin (dengan WEALTH 0) Rp. 76.682.574.075,00. Sementara, rata-rata aksesabilitas pendidikan (EDU) di daerah kaya menunjukkan angka sebesar 77% sedangkan di daerah miskin 75%. Perbedaan rata-rata tersebut menyiratkan bahwa di daerah kaya terdapat permintaan yang lebih tinggi atas layanan di bidang pendidikan daripada di daerah miskin. Hal tersebut akan diuji lebih lanjut dengan uji regresi linear.

4.2 Model Pengeluaran Pendidikan

4.2.1 Analisis Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Untuk model pengeluaran pendidikan, metode regresi data panel yang sesuai adalah metode *weighted: cross-section weight*. Hasil output pengujian pemilihan metode tersebut dapat dilihat pada Lampiran III. Berdasarkan pada hasil pengujian Hausman yang menunjukkan signifikansi sehingga H_0 ditolak, maka metode

regresi data panel tidak dapat menggunakan *random effect model* (REM) atau harus menggunakan *fixed effect model* (FEM).

Pengujian untuk menentukan metode kemudian dilanjutkan dengan menemukan dugaan heteroskedastisitas dengan melakukan uji LM (*Lagrange Multiplier*) atau yang juga dikenal dengan Breusch-Pagan *test*. Hasil dari uji LM tersebut mempunyai *p-value* 0.000 atau signifikan sehingga H_0 ditolak dan terbukti bahwa terdapat heteroskedastisitas. Karena model FEM memiliki struktur heteroskedastisitas, sesuai dengan Greene (2000) dalam Yuniarti (2010), model tersebut harus diestimasi dengan metode *weighted: cross-section weight*.

4.2.2 Hasil Uji Model Pengeluaran Pendidikan

Hasil output regresi data panel model pengeluaran pendidikan dari aplikasi EViews dapat dilihat pada Lampiran IV. Hasil output tersebut dirangkum pada tabel 4.4. di bawah ini:

Tabel 4.4. Ringkasan Output Regresi Model Pengeluaran Pendidikan

Dependent Variable : Pengeluaran Pendidikan (BPEND)

	Koefisien	t-statistik	<i>p-value</i>
PAD	0,133539	9,40484	0,000
DAU	0,692642	56,85632	0,000
DAK	0,426204	12,64864	0,000
WEALTH	42460,76	9,96112	0,000
C	-70849,39	-14,23702	0,000
<i>R-squared</i>	0,880093		
<i>Adj. R-squared</i>	0,879676		
F-statistik	2112,030		
Prob(F-statistik)	0,000000		

Variabel PAD, DAU, DAK, , ditransformasi menggunakan *square-root*

4.2.2.1 Hasil Uji-F

Output hasil regresi model pengeluaran pendidikan seperti yang dirangkum pada tabel 4.4. menunjukkan *p-value* F-statistik 0.000. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang signifikan pada taraf signifikansi 1%. Hasil yang signifikan tersebut menurut Nachrowi dan Usman (2006) menunjukkan bahwa paling tidak terdapat satu *slope* regresi yang signifikan secara statistik. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji-F di atas, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan kesejahteraan daerah secara simultan mempengaruhi pengeluaran pendidikan.

4.2.2.2 Hasil Uji-t

Hasil uji-t pada model pengeluaran pendidikan menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki *p-value* t-statistik yang signifikan pada taraf signifikansi 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang terdapat dalam model berpengaruh secara statistik terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien tiap-tiap variabel terikat seperti yang terlihat dalam tabel 4.4. menunjukkan seberapa besar tambahan unit variabel terikat apabila terdapat penambahan satu unit variabel bebas. Contohnya variabel DAK yang memiliki koefisien 0,426204, hal tersebut berarti bahwa setiap terjadi penambahan satu unit *square-root* DAK, maka akan terjadi penambahan 0,426204 unit *square-root* pengeluaran pendidikan (dengan asumsi *ceteris paribus*).

4.2.2.3 Hasil Uji *Goodness of Fit* (R^2)

Nilai koefisien determinasi atau R^2 menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Dapat dilihat pada tabel 4.4. bahwa nilai *adjusted* R^2 model pengeluaran pendidikan adalah sebesar 0,879676. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 87,97% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang terdapat pada model. Sisa variasi variabel terikat sebesar 12,03% dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model.

4.2.2.4 Hasil Uji Hipotesis Model Pengeluaran Pendidikan

Pada model pengeluaran pendidikan, terdapat empat hipotesis yang akan diuji. Hasil pengujian pada hipotesis-hipotesis tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

1. **H1a: PAD berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.**

Untuk menguji apakah hipotesis pertama ini dapat diterima, dapat dilakukan uji individu dengan membandingkan t_{hit} variabel PAD dengan t tabel. Selain dengan cara tersebut, pengujian hipotesis dapat juga dilihat dari p -value variabel PAD. Apabila p -value PAD lebih kecil daripada α (taraf signifikansi), maka H_0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan pengeluaran pendidikan (BPEND). p -value t-statistik variabel PAD adalah 0.000 sehingga dapat dinyatakan signifikan pada taraf signifikansi (α) 1%. Berdasarkan hal tersebut, maka H_0 ditolak dan hipotesis pertama penelitian ini dapat diterima. Koefisien variabel PAD seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.4. bernilai positif sebesar 0,133539. Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap BPEND. Hasil pengujian hipotesis pertama ini sesuai dengan hasil penelitian Priyono (2005).

2. **H1b: DAK berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.**

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki p -value t-statistik sebesar 0.000 sehingga dapat dikatakan signifikan pada taraf signifikansi 1%. Dengan p -value t-statistik sebesar 0.000 maka H_0 ditolak dan hipotesis H1b dapat diterima. Koefisien variabel DAK, seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.4., menunjukkan angka positif sebesar 0,426204. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa DAK pendidikan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Hasil uji hipotesis H1b ini sesuai dengan hasil penelitian Priyono (2005) dan Sukaesih (2008). Dalam dua penelitian tersebut ditemukan juga bahwa DAK pendidikan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *special purpose grant* dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sesuai dengan sifat DAK, Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat menggunakan DAK pendidikan untuk dibelanjakan pada fungsi pendidikan.

Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa kedua penelitian mengenai DAK pendidikan sebelumnya menunjukkan hasil yang sama, yaitu DAK pendidikan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

3. H1c: DAU berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Pada tabel 4.4., variabel DAU menghasilkan *p-value* t-statistik sebesar 0.000 dengan koefisien positif 0,692642. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Secara signifikan pada taraf signifikansi 1%, DAU berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Hasil uji hipotesis H1c tersebut sesuai dengan hasil penelitian Priyono (2005) dan Samosir (2008) namun bertolak belakang dengan penelitian Sukaesih (2008) yang menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan. Menurut Sukaesih (2008), DAU yang bersifat sebagai *block grant* mengakibatkan Pemerintah Daerah kurang menangkap bahwa salah satu tujuan alokasi DAU adalah untuk tujuan pembangunan, salah satunya untuk pendidikan. Pemerintah Kabupaten/Kota lebih banyak menghabiskan DAU untuk membiayai pengeluaran rutin misalnya belanja pegawai.

Argumen untuk pengaruh positif DAU terhadap pengeluaran pendidikan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Busemeyer (2007). Pemerintah Daerah memiliki tendensi untuk berlomba-lomba dalam hal penyediaan barang publik (*race to the top*). Penyediaan barang publik tersebut, menurut Busemeyer ditujukan untuk menarik simpati masyarakat yang merupakan pemilih (*voters*) perangkat kepemimpinan daerah otonom.

Di Indonesia Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota dipilih oleh masyarakat di daerahnya dan bukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga teori yang diungkapkan oleh Busemeyer tersebut dapat diaplikasikan. Sifat dari DAU sebagai *block grant* sehingga dapat dialokasikan dengan bebas oleh Pemerintah Daerah justru dapat memenuhi dugaan Busemeyer tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran publik (salah satunya di bidang pendidikan) untuk menarik simpati pemilih (*voter*). Setuju dengan hal tersebut, Samosir (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan publik misalnya pendidikan,

Pemerintah Daerah tidak selalu menunggu *special purpose grant* (DAK) untuk memenuhinya, Pemerintah Daerah dapat menggunakan *block grant* (DAU) yang bebas digunakan dibawah kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

4. H2: Kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran Pendidikan.

Hasil uji hipotesis H2 dapat dilihat dari *p-value* t-statistik dari variabel WEALTH. Dapat dilihat pada tabel 4.4. bahwa p-value WEALTH adalah 0.000 atau signifikan pada taraf signifikansi 1% sehingga H_0 dapat ditolak. Dapat disimpulkan dari hasil *p-value* yang signifikan dan koefisien variabel WEALTH yang bernilai positif bahwa kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Hasil uji hipotesis tersebut sesuai dengan penelitian Baldacci, Clements, Gupta dan Cui (2004). Menurut Baldacci, Clements, Gupta dan Cui, hal tersebut terjadi diyakini karena tingginya permintaan akan pendidikan akan lebih mungkin terjadi pada daerah yang lebih kaya dibandingkan dengan daerah yang miskin.

Selain karena permintaan akan pendidikan yang lebih tinggi pada daerah yang lebih kaya, pengaruh positif kesejahteraan daerah terhadap pengeluaran pendidikan dapat terjadi karena pembangunan (terutama infrastruktur) yang cenderung lebih memadai di suatu daerah yang tergolong kaya sehingga akan mendukung terselenggaranya pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal.

4.3 Model Aksesabilitas Pendidikan

4.3.1 Analisis Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Output hasil pengujian pemilihan metode regresi data panel dapat dilihat pada lampiran V. Metode regresi data panel yang sesuai dengan model aksesabilitas pendidikan adalah REM (*Random Effect Method*). Pemilihan metode tersebut didasari karena model tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada uji Hausman, yaitu 0.0816 (*cross-section random effects*) dan 0.223 (*period random effect*). Dengan hasil penelitian tersebut maka H_0 uji Hausman diterima, dan model regresi data panel harus diestimasi dengan menggunakan REM.

4.3.2 Hasil Uji Model Aksesabilitas Pendidikan

Hasil output regresi data panel model aksesabilitas pendidikan dengan menggunakan aplikasi EViews dapat dilihat pada Lampiran VI. Hasil tersebut dirangkum pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Ringkasan Output Regresi Model Aksesabilitas Pendidikan

Dependent Variable : Aksesabilitas Pendidikan (EDU)

	Koefisien	t-statistik	<i>p-value</i>
BPEND	1,46787	2.457506	0,0141
WEALTH	6,05354	5.439781	0,000
FD	4,46835	19.08027	0,000
C	76,69123	157.7354	0,000
<i>R-squared</i>	0.443840		
<i>Adj. R-squared</i>	0.443167		
F-statistik	659.9811		
Prob(F-statistik)	0,000000		

Variabel BPEND ditransformasi menggunakan *square-root*

4.3.2.1 Hasil Uji-F

Seperti dapat dilihat pada tabel 4.5., *p-value* F-statistik model aksesabilitas pendidikan bernilai 0.000 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan dari hasil uji-F tersebut yaitu bahwa pengeluaran pendidikan (BPEND), kesejahteraan daerah (WEALTH), dan kebijakan desentralisasi fiskal (FD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap aksesabilitas pendidikan (EDU).

4.3.2.2 Hasil Uji-t

Hasil uji-t pada model aksesabilitas pendidikan menunjukkan bahwa variabel bebas kebijakan desentralisasi fiskal (FD) dan kesejahteraan daerah memiliki *p-value* t-statistik 0.000 atau signifikan pada taraf signifikansi 1%, sedangkan variabel bebas pengeluaran pendidikan (BPEND) memiliki *p-value* t-statistik 0.0141 atau signifikan pada taraf signifikansi 5%. Koefisien BPEND sebesar

1,46787 dapat diartikan bahwa apabila terdapat penambahan satu unit *square root* pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah 1,46787 persentase aksesabilitas pendidikan.

4.3.2.3. Hasil Uji *Goodness of Fit* (R^2)

Nilai koefisien determinasi atau R^2 menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Dapat dilihat pada tabel 4.5. bahwa nilai *adjusted* R^2 model aksesabilitas pendidikan adalah sebesar 0.443167. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 44,32% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang terdapat pada model. Sisa variasi variabel terikat sebesar 55,68% dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model.

4.3.2.4 Hasil Uji Hipotesis Model Aksesabilitas Pendidikan

1. **H3: Pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.**

Pada tabel 4.5., dapat dilihat bahwa *p-value* t-statistik variabel pengeluaran pendidikan (BPEND) adalah 0.0141 sehingga dapat dikatakan signifikan pada taraf signifikansi 5%.

Taraf signifikansi untuk pengambilan keputusan atas hipotesis ini memang lebih besar dibandingkan dengan pada hipotesis lainnya, namun pada umumnya taraf signifikansi pada hasil uji hipotesis penelitian sosial adalah 5%. Hal tersebut dikarenakan pengambilan simpulan pada penelitian sosial bersifat lebih hati-hati dibandingkan pada penelitian ilmu pengetahuan alam. Taraf signifikansi sebesar 5% tersebut dapat diartikan bahwa keterjadian variabel pengeluaran pendidikan (BPEND) berpengaruh terhadap aksesabilitas pendidikan memiliki tingkat keyakinan sebesar 95%. Hal tersebut bukan berarti bahwa penggunaan variabel pengeluaran pendidikan pada model aksesabilitas pendidikan ini tidak lebih baik daripada variabel-variabel lainnya yang memiliki taraf signifikansi 1%.

Koefisien variabel BPEND bernilai positif sebesar 1,46787. Berdasarkan *p-value* dan arah koefisien variabel BPEND, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak

sehingga hipotesis H3 yaitu pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan diterima. Pengaruh signifikan positif antara pengeluaran pendidikan dengan aksesabilitas pendidikan menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota cukup efektif dalam meningkatkan aksesabilitas pendidikan. Hasil uji hipotesis ini sesuai dengan penelitian Sukaesih (2008) dan Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui (2004).

Efektifitas peningkatan aksesabilitas pendidikan oleh pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang semakin membaik di era kebijakan desentralisasi fiskal dijelaskan oleh Innocent (2011) dalam argumennya yang mengatakan bahwa salah satu manfaat pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah bahwa hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dan memudahkan pengawasan atas kinerja Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal, menurut Mardiasmo (2004) meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal tersebut menyiratkan bahwa dengan kebijakan desentralisasi fiskal, masyarakat dapat turut langsung mengawasi kinerja Pemerintah Daerah sehingga program kerja Pemerintah Daerah dapat berhasil dan tepat sasaran.

2. H4a: Kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.

Hasil uji hipotesis H4a dapat dilihat dari *p-value* t-statistik variabel kesejahteraan daerah (WEALTH) pada tabel 4.5. yang menunjukkan angka 0.000 dan koefisien variabel WEALTH yang menunjukkan nilai positif sebesar 6,05354. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik pada taraf signifikansi 1%, kesejahteraan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap aksesabilitas pendidikan. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Sukaesih (2008) dan Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui, (2004).

Menurut Sukaesih (2008), dengan semakin tingginya kesejahteraan daerah maka kemampuan masyarakat di daerah tersebut untuk memberikan pendidikan untuk anak-anak usia sekolah akan semakin tinggi. Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui, (2004) menjelaskan hal tersebut dengan teori permintaan. Tingginya

pendapatan per kapita (yang diukur dengan PDB per kapita) akan meningkatkan permintaan atas pendidikan.

3. H4b: Pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan lebih besar pada daerah kaya dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin.

Untuk menguji hipotesis H4b, dilakukan regresi linier sederhana pada variabel pengeluaran pendidikan (BPEND) terhadap aksesabilitas pendidikan (EDU) secara terpisah pada daerah yang kaya (dengan WEALTH=1) dan daerah yang miskin (dengan WEALTH=0) dan membandingkan koefisiennya. Hasil pengujian tersebut dirangkum pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Ringkasan Output Regresi Sederhana Variabel EDU dan BPEND

Dependent Variable : Aksesabilitas Pendidikan (EDU)

	BPEND (WEALTH=1)	BPEND (WEALTH=0)
Koefisien	8,48825	1,22846
t-statistik	14.20585	34.65924
Prob(t-statistik)	0.000000	0.000000
R-squared	0.847962	0.884646
Adj. R-squared	0.828490	0.870299
F-statistik	43.54601	61.66003
Prob(F-statistik)	0.000000	0.000000

Variabel BPEND ditransformasi menggunakan *square-root*

Hasil output regresi sederhana variabel EDU dan BPEND dengan aplikasi EViews dapat dilihat pada Lampiran VII.

Dapat dilihat pada tabel 4.6. di atas bahwa koefisien BPEND pada daerah kaya (WEALTH=1) adalah sebesar 8,48825. Angka tersebut cukup jauh di atas koefisien BPEND pada daerah miskin (WEALTH=0) yang sebesar 1,22846. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan lebih besar pada daerah kaya

dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin.

4. H5: Kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.

Pada tabel 4.5., variabel kebijakan desentralisasi fiskal (FD) menghasilkan *p-value* t-statistik sebesar 0.000 dan koefisien bernilai positif sebesar 4,46835. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik, kebijakan desentralisasi fiskal (FD) berpengaruh signifikan positif terhadap aksesabilitas pendidikan (EDU) pada taraf signifikansi 1%.

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian Sukaesih (2008), Samosir (2008), dan Simatupang (2009). Menurut Simatupang (2009), peningkatan keluaran pendidikan (diukur dengan angka partisipasi sekolah, tingkat melek huruf, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat *drop out*) yang signifikan di era kebijakan desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah yang terdesentralisasi secara signifikan memperbaiki layanan di bidang pendidikan. Masih menurut Simatupang, desentralisasi fiskal di Indonesia cukup membuat Pemerintah Daerah mampu memberikan layanan yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Pendapat Simatupang tersebut di atas, didukung oleh pendapat Litvack et al (1998) dalam Utama (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan pelayanan publik karena pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum.

4.4 Pembahasan Mengenai Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis model pengeluaran pendidikan dengan metode regresi data panel pada subbab 4.2, dapat dilihat bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan. Baik pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,

maupun dana alokasi khusus bidang pendidikan terbukti mampu mendorong pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada latar belakang penelitian ini sedikit disinggung mengenai ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat sehingga besaran pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil bila dibandingkan dengan pendapatan transfer misalnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kecilnya pendapatan asli daerah tersebut mengakibatkan sebagian besar pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebenarnya masih ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui transfer ke daerah. Padahal, dengan desentralisasi fiskal harusnya Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan sebesar-besarnya untuk menggali potensi daerah dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara mandiri.

Tersirat dari hasil analisis model pengeluaran pendidikan dengan metode regresi data panel pada subbab 4.3 bahwa secara agregat kenaikan pengeluaran pendidikan yang diakibatkan oleh kebijakan desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi kenaikan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat, namun pada hasil pengujian H4b terlihat bahwa pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan lebih besar pada daerah kaya dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin.

Pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan yang lebih besar pada daerah kaya dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin menunjukkan bahwa seolah-olah pengeluaran pendidikan pada daerah miskin tidak seefektif pada daerah kaya dalam meningkatkan aksesabilitas pendidikan. Dimisalkan sejumlah satu milyar rupiah sama-sama dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang kaya dan yang miskin, dengan jumlah tersebut Pemerintah Daerah yang kaya akan mampu meningkatkan aksesabilitas pendidikan sebesar 7%, sedangkan Pemerintah Daerah yang miskin hanya mampu meningkatkan aksesabilitas pendidikan sebesar 5%.

Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dijelaskan oleh penelitian sebelumnya dengan mengatakan bahwa permintaan akan pendidikan oleh masyarakat di daerah miskin akan pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di daerah kaya, namun alasan dibalik rendahnya permintaan masyarakat di daerah miskin tersebut belum banyak dibahas.

Rendahnya permintaan akan pendidikan oleh masyarakat di daerah miskin dapat terjadi karena dua hal berikut ini:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok akan pentingnya pendidikan. Kebanyakan masyarakat-masyarakat di daerah tersebut mencegah anaknya untuk bersekolah dan ikut membantu pekerjaan orang tuanya untuk meringankan beban hidup.
2. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kurang memadai di daerah miskin menghambat masyarakat untuk mengakses sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dibahas pada bab 4, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan terbukti secara empiris dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terbukti secara empiris dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.
3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota terbukti secara empiris dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.
4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota terbukti secara empiris berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin.
5. Kebijakan desentralisasi fiskal terbukti secara empiris dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.

5.2 Saran Untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat

5.2.1 Saran Untuk Pemerintah Daerah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan, maka sangat penting untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Saran dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Daerah dapat menggali potensi sumber daya daerah dengan semaksimal mungkin sehingga ketergantungan fiskal akan semakin

mengecil dan agar Pemerintah Daerah dapat berusaha untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas.

5.2.2 Saran Untuk Masyarakat

Kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan terutama untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Namun, dalam proses penyelenggaraan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, peran serta dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjamin keberhasilannya. Saran dari penelitian ini untuk masyarakat adalah agar masyarakat lebih aktif berperan serta dalam usaha pembangunan di daerah dan aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini telah dapat memberikan bukti empiris terkait hubungan antara kebijakan desentralisasi fiskal dan aksesabilitas pendidikan. Namun, dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengeluaran pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengaruhnya terhadap aksesabilitas pendidikan dan tidak memperhitungkan pengeluaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pihak swasta maupun rumah tangga.
2. Penelitian ini mengukur aksesabilitas pendidikan sesuai dengan yang diukur oleh indeks pembangunan manusia oleh UNDP. Aksesabilitas pendidikan yang diukur oleh UNDP menggunakan angka melek huruf dan angka partisipasi kasar dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, sementara APBD Pemerintah Kabupaten/Kota hanya membiayai pendidikan masyarakat setempat hingga tingkat SMA. Mulai tahun 2010 pengukuran indeks pembangunan manusia oleh UNDP pada dimensi pendidikan tidak lagi mengukur aksesabilitas pendidikan melainkan kualitas pendidikan.
3. Penelitian ini tidak menyertakan variabel yang mampu mewakili tingkat pengawasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah untuk menjamin

efektivitas program Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas, saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Untuk meneliti pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas ataupun *outcome* pendidikan, penelitian selanjutnya dapat menyertakan variabel pengeluaran pendidikan oleh pihak swasta dan rumah tangga untuk mengetahui seberapa besar perbedaan pengaruh pengeluaran pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan rumah tangga terhadap aksesabilitas ataupun *outcome* pendidikan agar dapat memberikan saran terhadap kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.
2. Penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada penelitian mengenai pengeluaran pendidikan terhadap kualitas pendidikan sesuai yang digunakan oleh Laporan Pembangunan Manusia. Lebih lanjut lagi, penelitian selanjutnya dapat membandingkan pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap kualitas pendidikan pada gender laki-laki dan perempuan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih baik bila dapat menyertakan variabel yang mampu mewakili tingkat pengawasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah untuk menjamin efektivitas program Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, misalnya dengan hasil opini BPK pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Ajija, Sari, et al. *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.
- Baldacci, Clements, et al. Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries: Implications for Achieving the MDGs. *IMF Working Paper* (2004).
- Busemeyer, Marius R. "The Impact of Fiscal Decentralisation on Education and Other Types of Spending." *MPIfG Discussion Paper 07/8* (2007).
- Gujarati, Damodar. *Basic Econometrics, 4th Edition*. Singapore: McGrawth Hill, 2003.
- Hakim, Abdul. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Hirawan, Susiyati Bambang. "Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia". *Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. 2007. 12 Mei 2012. <[http://web.me.com/adrianpangabean/Loose_Notes_on_Indonesia/Decentralization_and_Local_Finance_files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20\(Pidato%20Pengukuhan\).pdf](http://web.me.com/adrianpangabean/Loose_Notes_on_Indonesia/Decentralization_and_Local_Finance_files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20(Pidato%20Pengukuhan).pdf)>.
- Innocents, Edoun Emmanuel. Fiscal Decentralisation: A Local Solution to Recovery From Global Recession. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 24 (2011): 138-146.
- Kuncoro, Mudrajad. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004.

- Kyriacou, Anreas P. And Oriol Roca-Sagalés. Fiscal decentralization and government quality in the OECD. *Economic Letters 111* (2011): 191-193.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Menyoal Desentralisasi Anggaran Pendidikan*. Media Indonesia, 2011. 17 April 2012. <<http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/9075>>.
- Nachrowi, Nachrowi D. dan Hardius Usman. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Oktara, Beny Trias. Efek Otonomi Anggaran Terhadap Pendidikan : Studi Kasus Pada Lima Provinsi di Indonesia. *Jurnal BPPK Vol. 1*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2010.
- Priyono, Edy. *Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek*. 2005. 22 Mei 2012. <[http://www.akademika.or.id/arsip/Pembiayaan%20 Pendidikan-Edy%20Priyono.pdf](http://www.akademika.or.id/arsip/Pembiayaan%20Pendidikan-Edy%20Priyono.pdf)>.
- Qing, Luo Wei and Chen Shi. Fiscal Decentralization And Public Education Provision In China. *Canadian Sosial Science Vol. 6 No. 4* (2010): 28-41.
- Samosir, Melva. *The Effects of Decentralization on Education in Indonesia: Education for All?*. Netherlands: Universiteit Maastricht, 2008.
- Sekaran, Uma. *Research Methods for Business: A skill Building Approach, 4th Edition*. New York: John Wiley and Sons, 2003.
- Simatupang, Rentanida Renata. *Evaluation of Decentralization Outcomes in Indonesia: Analysis of Health and Education Sectors*. Georgia: Georgia State University, 2009.
- Statistik Keuangan Pemerintah Daerah APBD 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011.

Sukaesih, Mamay. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akses Pendidikan Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Periode 1995-1997 dan 2003-2006*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Susanto, Satya dan Hendra Kurniawan. Mengukur Kinerja Anggaran Fungsi Pendidikan dan Alokasinya dalam APBN 2010. *Media Keuangan Vol. IV* (2009): 44-50.

UNESCO. *International Workshop on Education and Poverty Eradication Kampala, Uganda. 30 July-3 August 2001*. 12 Mei 2012. <<http://www.unesco.org/education/poverty/news.shtml>>.

United Nations Development Programme. "Sustainability and Equity: A Better Future for All". *Human Development Report 2011*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Utama, Sampurna Budi. *Menengok Kembali Isu Efisiensi Dalam Praktik Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 21 Mei 2012. http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/439_NEW%20Menengok%20isu%20efisiensi%20Pak%20Sampurna.pdf.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2005.

Yuniarti, Desi. *Pemodelan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2008 Dengan Regresi Panel*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2010.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

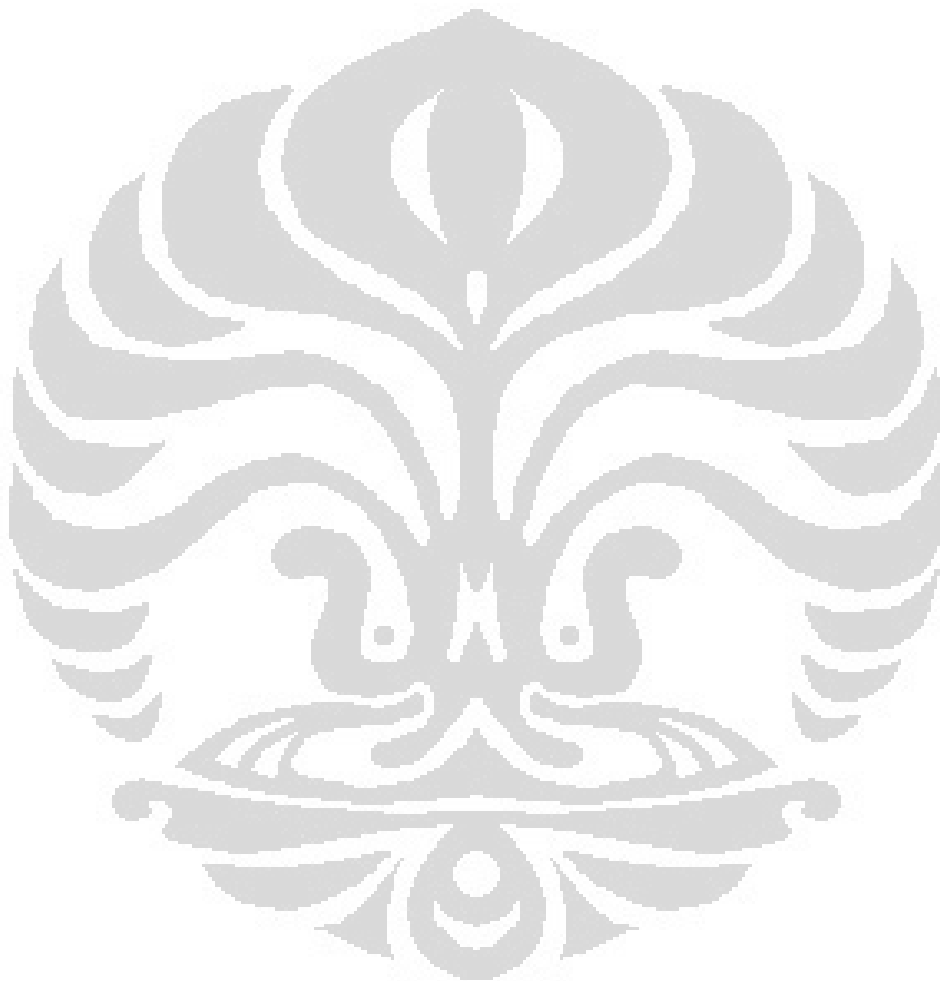
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Lampiran I : Kabupaten/Kota Subyek Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Aceh Barat
2	Kab. Aceh Besar
3	Kab. Aceh Selatan
4	Kab. Aceh Tengah
5	Kab. Aceh Tenggara
6	Kab. Aceh Timur
7	Kab. Aceh Utara
8	Kab. Pidie
9	Kota Banda Aceh
10	Kota Sabang
11	Kab. Asahan
12	Kab. Dairi
13	Kab. Labuhan Batu
14	Kab. Langkat
15	Kab. Nias
16	Kab. Simalungun
17	Kab. Tanah Karo
18	Kab. Tapanuli Selatan
19	Kab. Tapanuli Tengah
20	Kab. Tapanuli Utara
21	Kota Binjai
22	Kota Medan
23	Kota Pematang Siantar
24	Kota Sibolga
25	Kota Tanjung Balai
26	Kota Tebing Tinggi
27	Kab. Agam
28	Kab. Lima puluh Kota
29	Kab. Padang Pariaman
30	Kab. Pasaman
31	Kab. Pesisir Selatan
32	Kab. Sawahlunto Sijunjung
33	Kab. Solok
34	Kab. Tanah Datar
35	Kota Bukit Tinggi
36	Kota Padang
37	Kota Padang Panjang
38	Kota Payakumbuh

(Sambungan)

39	Kota Sawahlunto
40	Kota Solok
41	Kab. Bengkulu
42	Kab. Indragiri Hilir
43	Kab. Indragiri Hulu
44	Kab. Kampar
45	Kota Pekanbaru
46	Kab. Batanghari
47	Kab. Kerinci
48	Kab. Bungo
49	Kab. Sarolangun
50	Kab. Tanjung Jabung Barat
51	Kota Jambi
52	Kab. Bangka
53	Kab. Belitung
54	Kab. Lahat
55	Kab. Muara Enim
56	Kab. Musi Banyuasin
57	Kab. Musi Rawas
58	Kab. Ogan Komering Ilir
59	Kab. Ogan Komering Ulu
60	Kota Palembang
61	Kab. Bengkulu Selatan
62	Kab. Bengkulu Utara
63	Kab. Rejang Lebong
64	Kota Bengkulu
65	Kab. Lampung Selatan
66	Kab. Lampung Tengah
67	Kab. Lampung Utara
68	Kab. Lampung Barat
69	Kota Bandar Lampung
70	Kab. Bandung
71	Kab. Bekasi
72	Kab. Bogor
73	Kab. Ciamis
74	Kab. Cianjur
75	Kab. Cirebon

(Sambungan)

76	Kab. Garut
77	Kab. Indramayu
78	Kab. Karawang
79	Kab. Kuningan
80	Kab. Lebak
81	Kab. Majalengka
82	Kab. Pandeglang
83	Kab. Purwakarta
84	Kab. Subang
85	Kab. Sukabumi
86	Kab. Sumedang
87	Kab. Tangerang
88	Kab. Tasikmalaya
89	Kota Bandung
90	Kota Bogor
91	Kota Cirebon
92	Kota Sukabumi
93	Kota Tangerang
94	Kab. Banjarnegara
95	Kab. Banyumas
96	Kab. Batang
97	Kab. Blora
98	Kab. Boyolali
99	Kab. Brebes
100	Kab. Cilacap
101	Kab. Demak
102	Kab. Grobogan
103	Kab. Jepara
104	Kab. Karanganyar
105	Kab. Kebumen
106	Kab. Kendal
107	Kab. Klaten
108	Kab. Kudus
109	Kab. Magelang
110	Kab. Pati
111	Kab. Pekalongan
112	Kab. Pemasang
113	Kab. Purbalingga
114	Kab. Purworejo
115	Kab. Rembang

(Sambungan)

116	Kab. Semarang
117	Kab. Sragen
118	Kab. Sukoharjo
119	Kab. Tegal
120	Kab. Temanggung
121	Kab. Wonogiri
122	Kab. Wonosobo
123	Kota Magelang
124	Kota Pekalongan
125	Kota Salatiga
126	Kota Semarang
127	Kota Surakarta
128	Kota Tegal
129	Kab. Bantul
130	Kab. Gunung Kidul
131	Kab. Kulon Progo
132	Kab. Sleman
133	Kota Yogyakarta
134	Kab. Bangkalan
135	Kab. Banyuwangi
136	Kab. Blitar
137	Kab. Bojonegoro
138	Kab. Bondowoso
139	Kab. Gresik
140	Kab. Jember
141	Kab. Jombang
142	Kab. Kediri
143	Kab. Lamongan
144	Kab. Lumajang
145	Kab. Madiun
146	Kab. Magetan
147	Kab. Malang
148	Kab. Mojokerto
149	Kab. Nganjuk
150	Kab. Ngawi
151	Kab. Pacitan
152	Kab. Pamekasan
153	Kab. Pasuruan
154	Kab. Ponorogo
155	Kab. Probolinggo

(Sambungan)

156	Kab. Sampang
157	Kab. Sumenep
158	Kab. Sidoarjo
159	Kab. Situbondo
160	Kab. Trenggalek
161	Kab. Tuban
162	Kab. Tulungagung
163	Kota Blitar
164	Kota Kediri
165	Kota Madiun
166	Kota Malang
167	Kota Mojokerto
168	Kota Pasuruan
169	Kota Probolinggo
170	Kota Surabaya
171	Kab. Kapuas Hulu
172	Kab. Ketapang
173	Kab. Pontianak
174	Kab. Sambas
175	Kab. Sanggau
176	Kab. Sintang
177	Kota Pontianak
178	Kab. Barito Selatan
179	Kab. Barito Utara
180	Kab. Kapuas
181	Kab. Kotawaringin Barat
182	Kab. Kotawaringin Timur
183	Kota Palangkaraya
184	Kab. Banjar
185	Kab. Barito Kuala
186	Kab. Hulu Sungai Selatan
187	Kab. Hulu Sungai Tengah
188	Kab. Hulu Sungai Utara
189	Kab. Kota Baru
190	Kab. Tabalong
191	Kab. Tanah Laut
192	Kab. Tapin
193	Kota Banjarmasin
194	Kab. Berau
195	Kab. Bulungan
196	Kab. Kutai Barat

(Sambungan)

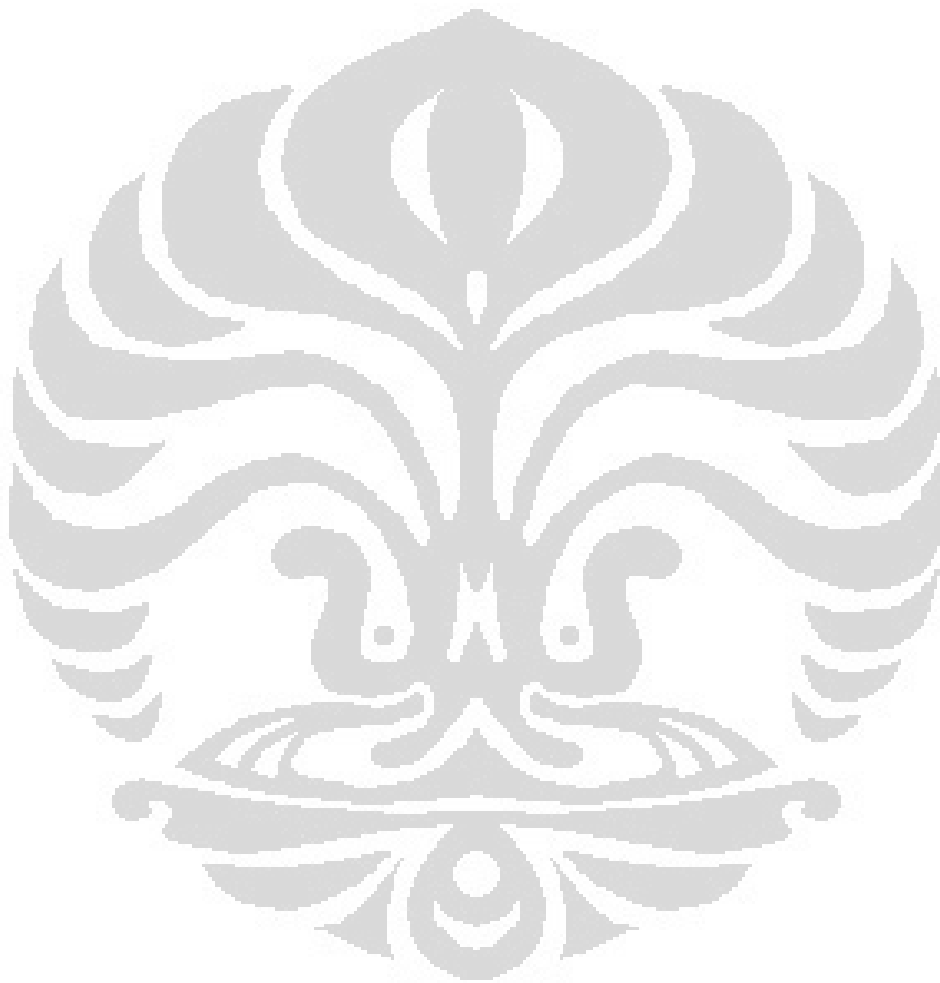
197	Kab. Kutai Kartanegara
198	Kab. Kutai Timur
199	Kab. Pasir
200	Kota Balikpapan
201	Kota Samarinda
202	Kab. Bolaang Mongondow
203	Kab. Gorontalo Utara
204	Kab. Minahasa
205	Kab. Sangihe
206	Kota Gorontalo
207	Kota Manado
208	Kota Bitung
209	Kab. Banggai
210	Kab. Donggala
211	Kab. Poso
212	Kab. Buol
213	Kota Palu
214	Kab. Bantaeng
215	Kab. Barru
216	Kab. Bone
217	Kab. Bulukumba
218	Kab. Enrekang
219	Kab. Gowa
220	Kab. Jeneponto
221	Kab. Luwu
222	Kab. Majene
223	Kab. Mamuju
224	Kab. Maros
225	Kab. Pangkajene Kepulauan
226	Kab. Pinrang
227	Kab. Polewali Mandar
228	Kab. Mamasa
229	Kab. Selayar
230	Kab. Sidenreng Rappang
231	Kab. Sinjai
232	Kab. Soppeng
233	Kab. Takalar
234	Kab. Tana Toraja
235	Kab. Wajo
236	Kota Parepare
237	Kota Makassar

(Sambungan)

238	Kab. Buton
239	Kab. Kolaka
240	Kab. Muna
241	Kota Kendari
242	Kab. Badung
243	Kab. Bangli
244	Kab. Buleleng
245	Kab. Gianyar
246	Kab. Jembrana
247	Kab. Karangasem
248	Kab. Klungkung
249	Kab. Tabanan
250	Kota Denpasar
251	Kab. Bima
252	Kab. Dompu
253	Kab. Lombok Barat
254	Kab. Lombok Tengah
255	Kab. Lombok Timur
256	Kab. Sumbawa
257	Kota Mataram
258	Kab. Alor
259	Kab. Belu
260	Kab. Flores Timur
261	Kab. Kupang
262	Kab. Manggarai
263	Kab. Ngada
264	Kab. Sikka
265	Kab. Sumba Barat
266	Kab. Sumba Timur
267	Kab. Timor Tengah Selatan
268	Kab. Timor Tengah Utara
269	Kab. Maluku Tengah
270	Kab. Maluku Tenggara
271	Kab. Maluku Barat Daya
272	Kab. Halmahera Tengah
273	Kota Ambon
274	Kab. Fak Fak
275	Kab. Jayapura
276	Kab. Jayawijaya
277	Kab. Manokwari

(Sambungan)

278	Kab. Merauke
279	Kab. Paniai
280	Kota Sorong
281	Kab. Biak Numfor
282	Kab. Kepulauan Yapen
283	Kota Jayapura



Lampiran II : Tabel Output Uji Beda SPSS

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
								95% Confidence Interval of the Difference	
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
BPEND Equal variances assumed	26.803	.000	-2.341	2828	.019	-1.33666	5.71045	-2.4563	-2.16954
Equal variances not assumed			-2.071	718.919	.039	-1.33666	6.45306	-2.6035	-6.97514

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
								95% Confidence Interval of the Difference	
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
EDU Equal variances assumed	13.616	.000	-2.887	2828	.004	-2.9177	1.01052	-4.89919	-.93630
Equal variances not assumed			-2.543	715.930	.011	-2.9177	1.14747	-5.17056	-.66493

Lampiran III : Tabel Output Pemilihan Metode Regresi
Model Pengeluaran Pendidikan

Redundant Fixed Effects Tests – Chow Test
Equation: MODELBPEND
Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	35.224086	(4,1147)	0.0000
Period Chi-square	133.934515	4	0.0000

Period fixed effects test equation:
Dependent Variable: SQBPEND
Method: Panel Least Squares
Date: 06/19/12 Time: 20:14
Sample (adjusted): 2005 2009
Periods included: 5
Cross-sections included: 282
Total panel (unbalanced) observations: 1156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-54758.95	13206.22	-4.146452	0.0000
SQPAD	0.150012	0.031663	4.737756	0.0000
SQDAU	0.629745	0.027702	22.73249	0.0000
SQDAK	0.521565	0.080913	6.445993	0.0000
WEALTH	54933.25	8413.145	6.529455	0.0000

R-squared	0.520943	Mean dependent var	397096.7
Adjusted R-squared	0.519278	S.D. dependent var	148442.6
S.E. of regression	102921.3	Akaike info criterion	25.92563
Sum squared resid	1.22E+13	Schwarz criterion	25.94749
Log likelihood	-14980.02	Hannan-Quinn criter.	25.93388
F-statistic	312.9095	Durbin-Watson stat	1.273349
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sambungan)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODELBPEND
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	107.716277	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
SQPAD	-0.095888	0.058729	0.000343	0.0000
SQDAU	0.255191	0.554319	0.001362	0.0000
SQDAK	1.058792	0.638459	0.003014	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: SQBPEND
Method: Panel Least Squares
Date: 06/15/12 Time: 11:04
Sample (adjusted): 2005 2009
Periods included: 5
Cross-sections included: 282
Total panel (unbalanced) observations: 1156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	156896.2	22396.28	7.005457	0.0000
SQPAD	-0.095888	0.035621	-2.691915	0.0072
SQDAU	0.255191	0.047887	5.329025	0.0000
SQDAK	1.058792	0.092808	11.40840	0.0000
WEALTH	NA	NA	NA	NA

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.769426	Mean dependent var	397096.7
Adjusted R-squared	0.694244	S.D. dependent var	148442.6
S.E. of regression	82081.59	Akaike info criterion	25.67882
Sum squared resid	5.87E+12	Schwarz criterion	26.92451
Log likelihood	-14557.36	Hannan-Quinn criter.	26.14892
F-statistic	10.23425	Durbin-Watson stat	2.349646
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sambungan)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODELBPEND
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	140.896343	4	0.0000

** WARNING: estimated period random effects variance is zero.

Period random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
SQPAD	0.185232	0.150012	0.000031	0.0000
SQDAU	0.654234	0.629745	0.000032	0.0000
SQDAK	0.233731	0.521565	0.005938	0.0002
WEALTH	42488.99554	4 54933.253859	6639829.3284	23 0.0000

Period random effects test equation:
Dependent Variable: SQBPEND
Method: Panel Least Squares
Date: 06/19/12 Time: 20:23
Sample (adjusted): 2005 2009
Periods included: 5
Cross-sections included: 282
Total panel (unbalanced) observations: 1156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42984.44	16115.95	-2.667198	0.0078
SQPAD	0.185232	0.030452	6.082757	0.0000
SQDAU	0.654234	0.026800	24.41172	0.0000
SQDAK	0.233731	0.108578	2.152651	0.0316
WEALTH	42489.00	8360.455	5.082139	0.0000

Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.573352	Mean dependent var	397096.7
Adjusted R-squared	0.570376	S.D. dependent var	148442.6
S.E. of regression	97297.71	Akaike info criterion	25.81669
Sum squared resid	1.09E+13	Schwarz criterion	25.85603
Log likelihood	-14913.05	Hannan-Quinn criter.	25.83154
F-statistic	192.6750	Durbin-Watson stat	1.214056
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sambungan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2658.360	1	2658.360	378.495	.000 ^a
	Residual	19862.464	2828	7.024		
	Total	22520.824	2829			

a. Predictors: (Constant), Unstandardized Predicted Value

b. Dependent Variable: g (hasil regresi (res1sq/(RSS)/n) dengan predicted value)

Hasil uji LM (Breusch-Pagan *Test*)

Distribusi χ^2_g (2658.360,1) (p-value uji LM)	0,000*
--------------------------------------------------------	--------

* kesimpulan: terdeteksi *heteroscedasticity*, gunakan *metode weighted : cross-section weights*

Lampiran IV : Tabel Output Regresi Model Pengeluaran Pendidikan

Dependent Variable: SQBPEND
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 06/19/12 Time: 20:31
 Sample (adjusted): 2005 2009
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 282
 Total panel (unbalanced) observations: 1156
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-70849.39	4976.419	-14.23702	0.0000
SQPAD	0.133539	0.014199	9.404841	0.0000
SQDAU	0.692642	0.012182	56.85632	0.0000
SQDAK	0.426204	0.033696	12.64864	0.0000
WEALTH	42460.76	4262.650	9.961119	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.880093	Mean dependent var	829530.1
Adjusted R-squared	0.879676	S.D. dependent var	607658.7
S.E. of regression	100971.6	Sum squared resid	1.17E+13
F-statistic	2112.030	Durbin-Watson stat	1.420937
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.516309	Mean dependent var	397096.7
Sum squared resid	1.23E+13	Durbin-Watson stat	1.280982

Lampiran V : Tabel Output Pemilihan Metode Regresi
Model Aksesabilitas Pendidikan

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: MODELEDU

Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	2.995824	2	0.2236

Period random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
SQBPEND	-0.000003	-0.000002	0.000000	0.1432
WEALTH	6.029858	6.013127	0.000102	0.0976

Period random effects test equation:

Dependent Variable: EDU

Method: Panel Least Squares

Date: 06/15/12 Time: 09:55

Sample: 1996 2009

Periods included: 10

Cross-sections included: 276

Total panel (unbalanced) observations: 2485

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	79.54342	0.364613	218.1584	0.0000
SQBPEND	-2.81E-06	1.59E-06	-1.768858	0.0770
WEALTH	6.029858	0.396823	15.19533	0.0000
FD	NA	NA	NA	NA

Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.164038	Mean dependent var	80.07449
Adjusted R-squared	0.160320	S.D. dependent var	8.339709
S.E. of regression	7.642013	Akaike info criterion	6.910016
Sum squared resid	144424.1	Schwarz criterion	6.938112
Log likelihood	-8573.695	Hannan-Quinn criter.	6.920219
F-statistic	44.11546	Durbin-Watson stat	0.149022
Prob(F-statistic)	0.000000		

(Sambungan)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: MODELEDU

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.010918	2	0.0816

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
SQBPEND	0.000002	0.000001	0.000000	0.2569
FD	4.457288	4.468349	0.000257	0.4901

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: EDU

Method: Panel Least Squares

Date: 06/15/12 Time: 09:57

Sample: 1996 2009

Periods included: 10

Cross-sections included: 276

Total panel (unbalanced) observations: 2485

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	77.72017	0.081053	958.8797	0.0000
SQBPEND	1.52E-06	5.99E-07	2.538098	0.0112
WEALTH	NA	NA	NA	NA
FD	4.457288	0.234735	18.98861	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.903870	Mean dependent var	80.07449
Adjusted R-squared	0.891804	S.D. dependent var	8.339709
S.E. of regression	2.743189	Akaike info criterion	4.961223
Sum squared resid	16607.86	Schwarz criterion	5.612093
Log likelihood	-5886.320	Hannan-Quinn criter.	5.197592
F-statistic	74.91486	Durbin-Watson stat	1.441167
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran VI : Tabel Output Regresi Model Aksesabilitas Pendidikan

Dependent Variable: EDU
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/15/12 Time: 09:47
 Sample: 1996 2009
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 276
 Total panel (unbalanced) observations: 2485
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	76.69123	0.486202	157.7354	0.0000
SQBPEND	1.47E-06	5.97E-07	2.457506	0.0141
WEALTH	6.053535	1.112827	5.439781	0.0000
FD	4.468349	0.234187	19.08027	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			7.167362	0.8722
Idiosyncratic random			2.743189	0.1278
Weighted Statistics				
R-squared	0.443840	Mean dependent var		10.09369
Adjusted R-squared	0.443167	S.D. dependent var		3.785501
S.E. of regression	2.749202	Sum squared resid		18751.67
F-statistic	659.9811	Durbin-Watson stat		1.276050
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.150548	Mean dependent var		80.07449
Sum squared resid	146754.8	Durbin-Watson stat		0.163048

Lampiran VII : Tabel Output Regresi Pengaruh BPEND Terhadap EDU

Hasil Regresi Sederhana Pengaruh BPEND Pada EDU Dengan WEALTH 0

Dependent Variable: EDU
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/16/12 Time: 16:51
 Sample: 1996 2009 IF WEALTH=0
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 224
 Total panel (unbalanced) observations: 2026

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	76.48401	0.098659	775.2330	0.0000
SQBPEND	1.23E-05	3.54E-07	34.65924	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.884646	Mean dependent var	78.99350
Adjusted R-squared	0.870299	S.D. dependent var	8.375894
S.E. of regression	3.016495	Akaike info criterion	5.150459
Sum squared resid	16387.74	Schwarz criterion	5.773909
Log likelihood	-4992.415	Hannan-Quinn criter.	5.379228
F-statistic	61.66003	Durbin-Watson stat	1.383716
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Regresi Sederhana Pengaruh BPEND Pada EDU Dengan WEALTH 1

Dependent Variable: EDU
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/16/12 Time: 16:52
 Sample: 1996 2009 IF WEALTH=1
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 52
 Total panel (unbalanced) observations: 459

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	82.98267	0.178302	465.4058	0.0000
SQBPEND	8.49E-06	5.98E-07	14.20585	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.847962	Mean dependent var	84.84589
Adjusted R-squared	0.828490	S.D. dependent var	6.248462
S.E. of regression	2.587726	Akaike info criterion	4.847676
Sum squared resid	2718.709	Schwarz criterion	5.324451
Log likelihood	-1059.542	Hannan-Quinn criter.	5.035437
F-statistic	43.54601	Durbin-Watson stat	1.287299
Prob(F-statistic)	0.000000		